

**POTENSI DESA
KALIMANTAN TENGAH 2014**

<http://kalengbps.go.id>

POTENSI DESA KALIMANTAN TENGAH 2014

No. Publikasi : 62520.1502
Katalog BPS : 1105005.62

Ukuran Buku : 15 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 131 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Tim Penyusunan Naskah :

Penanggung Jawab Umum: Sukardi

Koordinator : Syafi'i Nur

Anggota : Yanis Habibie

Iskandar

Mulya Setiawan

Sri Isnawati

Ikhlas Mukmin

Radian

Tata Letak dan Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Koordinator : Bob Setiabudi

Tata Letak : Ervin Prasetyaning Astuti

Vina Natalia

Gambar Kulit : Mertha Endah Ervina

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik

Provinsi Kalimantan Tengah

“Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya”

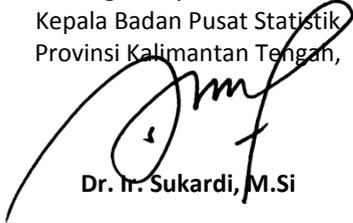
KATA PENGANTAR

Publikasi Potensi Desa Kalimantan Tengah 2014 diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yang berisi berbagai data dan informasi terpilih seputar desa di Provinsi Kalimantan Tengah yang dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan pembangunan serta potensi yang ada.

Materi yang disajikan dalam Publikasi Potensi Desa Kalimantan Tengah 2014 memuat berbagai informasi/indikator terpilih yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor yang dikelompokkan dalam bagian-bagian sebagai berikut: penjelasan umum, kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, hiburan dan olah raga, angkutan komunikasi dan informasi, ekonomi, serta keamanan. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Palangka Raya, Mei 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Tengah,



Dr. Ir. Sukardi, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
PENDAHULUAN	xiii
KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN.....	7
2.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah.....	9
2.2. Topografi Wilayah.....	14
KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN.....	17
3.1. Sumber Penghasilan Utama Penduduk.....	19
3.2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI).....	22
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	25
4.1. Perumahan.....	27
4.1.1. Listrik.....	27
4.1.2. Fasilitas Tempat Tinggal.....	29
4.2. Lingkungan Hidup.....	36
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN.....	43
5.1. Pendidikan.....	45
5.2. Kesehatan.....	54
SOSIAL DAN BUDAYA	69
6.1. Keragaman Agama dan Suku/Etnis	71
6.2. Penyandang Cacat.....	73
6.3. Budaya.....	76
HIBURAN DAN OLAHRAGA.....	79
7.1. Hiburan	81
7.2. Olah Raga.....	83
ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	89
8.1. Angkutan.....	91
8.2. Komunikasi.....	99

EKONOMI	105
9.1. Industri Mikro dan Kecil.....	107
9.2. Sarana Perdagangan	110
9.3. Sarana Akomodasi	113
9.4. Koperasi	115
9.5. Fasilitas Perkreditan dan Perbankan	118
KEAMANAN.....	123

<http://kalteng.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Pemerintahan, 2014....	11
Tabel 2.2.	Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, 2014	13
Tabel 2.3.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Topografi Wilayah, 2014	15
Tabel 2.4.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Wilayahnya Terhadap Laut dan Hutan, 2014	16
Tabel 3.1.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2014	22
Tabel 3.2.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan TKI dan Agen Pengerahan TKI, 2014	23
Tabel 4.1.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama, 2014.....	29
Tabel 4.2.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga, 2014	32
Tabel 4.3.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, Tempat Pembuangan Sampah Sebagian Besar Keluarga, dan Keberadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), 2014	33
Tabel 4.4.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar yang Digunakan Sebagian Besar Keluarga, 2014	36
Tabel 4.5.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sungai, Saluran Irigasi, dan Danau/Waduk/Situ/Bendungan, 2014	37
Tabel 4.6.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sungai Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Pemanfaatannya dan Keberadaan Pembuangan Limbah Pabrik ke Sungai, 2014	38
Tabel 4.7.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, Permukiman	

	Kumuh, Kebiasaan Membakar Lahan, dan Lokasi Golongan C, 2014.....	40
Tabel 4.8.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup, 2014	42
Tabel 5.1.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis/Jenjang Pendidikan, 2014 ...	47
Tabel 5.2.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan TK/RA/BA, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak (TPA), 2014.....	50
Tabel 5.3.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Paket A/B/C, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 2014	51
Tabel 5.4.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lembaga Keterampilan, 2014.....	53
Tabel 5.5.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Kesehatan, 2014	59
Tabel 5.6.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi/Paraji yang Tinggal/Menetap di Desa/ Kelurahan, 2014.....	61
Tabel 5.7.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir, 2014	63
Tabel 5.8.	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penderita Gizi Buruk Selama 3 Tahun Terakhir, 2014.....	65
Tabel 5.9.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Warga Penerima Kartu Jamkesmas/Jamkesda, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan Peserta BPJS Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 2014	67
Tabel 6.1.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keragaman Agama, Suku/Etnis, dan Bahasa, 2014	73
Tabel 6.2.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Penyandang Cacat dan Warga yang Dipasung, 2014.....	75

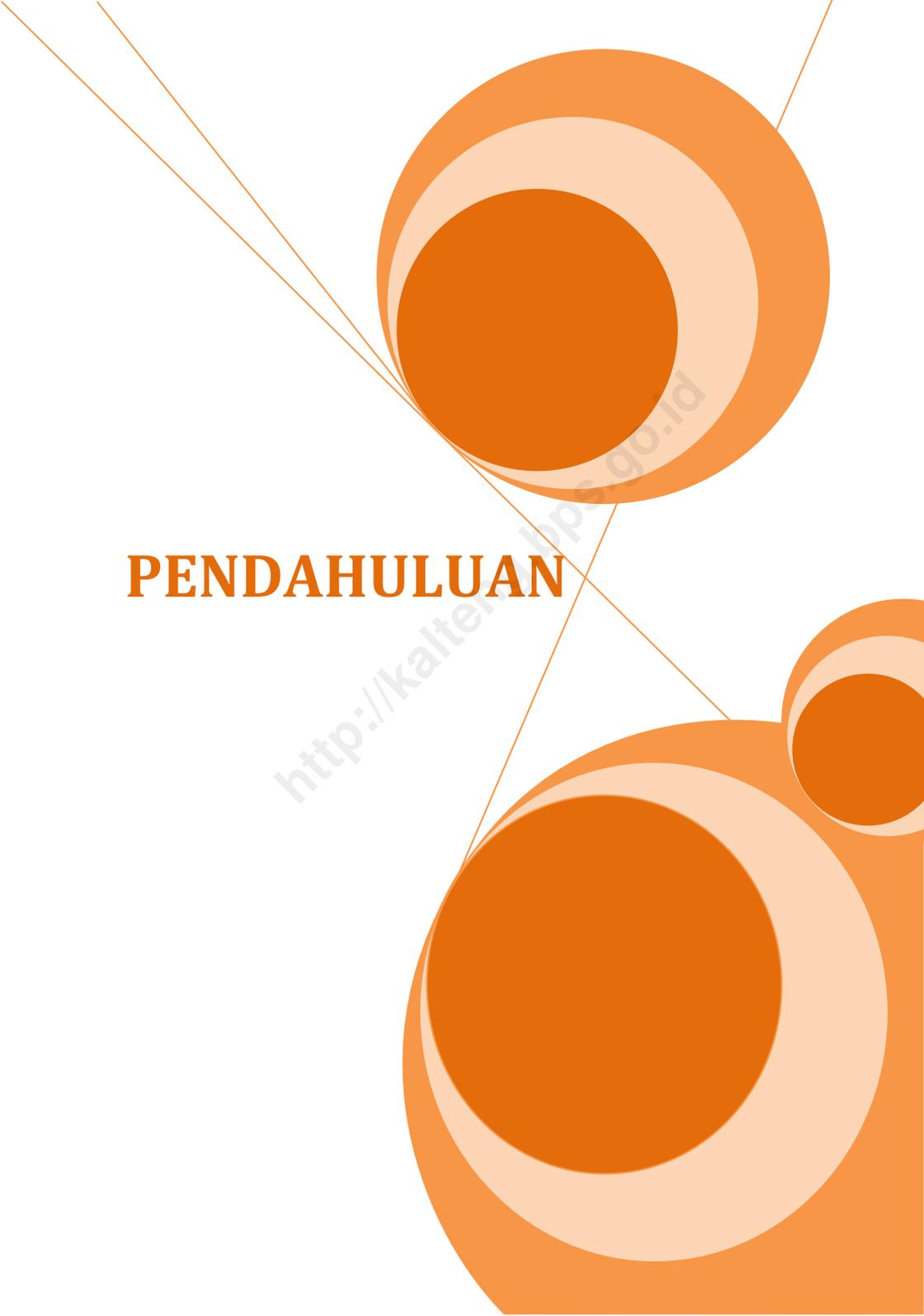
Tabel 6.3.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Budaya/Adat/Kebiasaan Masyarakat, 2014	78
Tabel 7.1.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Ruang Publik Terbuka, Bioskop, dan Pub/Diskotik/ Karaoke, 2014	82
Tabel 7.2.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Olah Raga, 2014	87
Tabel 8.1.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Prasarana Transportasi dan Keberadaan Angkutan Umum, 2014	95
Tabel 8.2.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan Terluas, 2014	97
Tabel 8.3.	Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat, 2014.....	98
Tabel 8.4.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Komunikasi, 2014.....	101
Tabel 8.5.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Menara Telpon Seluler/ <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) dan Sinyal Telepon Seluler, 2014.....	103
Tabel 9.1.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Industri Mikro dan Kecil, 2014.....	109
Tabel 9.2.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Perdagangan, 2014	112
Tabel 9.3.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Akomodasi, 2014	115
Tabel 9.4.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Koperasi, 2014	117
Tabel 9.5.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Fasilitas Perkreditan, 2014.....	119
Tabel 9.6.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Fasilitas Perbankan, 2014	121
Tabel 10.1.	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan Setahun Terakhir, 2014	127

Tabel 10.2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan, 2014	129
Tabel 10.3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Pos Polisi dan Anggota Linmas/Hansip, 2014.....	130

<http://kalteng.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, 2005-2014	10
Gambar 2.2	Persentase Wilayah Adminstrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan.....	12
Gambar 2.3.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah, 2014.....	14
Gambar 3.1.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2014	21
Gambar 4.1.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pengguna Listrik PLN dan Non PLN Serta Penerangan Jalan Utama, 2014.....	28
Gambar 4.2.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga, 2014	31
Gambar 4.3.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Besar Keluarga, 2014	34
Gambar 5.1.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan TK/RA/BA, Pos PAUD, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak (TPA), 2014	49
Gambar 5.2.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan, 2014.....	58
Gambar 6.1.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Agama dan Suku/Etnis, 2014.....	72
Gambar 8.1.	Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Keberadaan Angkutan Umum, 2014	96



PENDAHULUAN

<http://kalteknologi.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

Data hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) hingga saat ini merupakan satu-satunya sumber data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah setingkat desa di seluruh Indonesia. Data Podes tersebut dapat diolah sehingga dihasilkan informasi penting berbasis wilayah untuk berbagai keperluan oleh berbagai pihak yang membutuhkan.

Pendataan Podes telah dilaksanakan sejak 1980. Sejak saat itu, Podes dilaksanakan secara rutin sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 10 tahun sebagai bagian dari rangkaian kegiatan sensus yang dilakukan oleh BPS. Sejak tahun 2008, Podes dilakukan 2 tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Pada tahun berakhir '1', pendataan Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Pertanian yaitu identifikasi wilayah konsentrasi usaha pertanian menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhir '4', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Ekonomi dalam rangka identifikasi usaha menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhir '8', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Penduduk yaitu untuk identifikasi wilayah permukiman baru. Dengan demikian, fakta penting terkait ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah dapat dipantau perkembangannya secara berkala dan terus menerus.

Adapun pendataan Podes dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Menyediakan data tentang keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan yang

meliputi sarana dan prasarana wilayah, potensi ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan masyarakat lainnya untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan tingkat daerah.

- 2) Menyediakan data dasar bagi keperluan penentuan klasifikasi/tipologi wilayah (seperti: perkotaan-perdesaan, wilayah tertinggal, wilayah pesisir, dan sebagainya) dan penyusunan statistik wilayah kecil (*small area statistics*).
- 3) Melengkapi penyusunan kerangka sampel untuk kegiatan statistik lain lebih lanjut.

Podes 2014 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan dan wilayah administrasi terkecil setingkat desa di seluruh Indonesia. Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki wilayah hukum dengan batas wilayah yang jelas;
- 2) Memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya;
- 3) Memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Pengumpulan data Podes dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang berwenang dan relevan di wilayah pencacahan. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS kabupaten/kota yang telah dinyatakan lulus pada pelatihan Podes berstandar nasional. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, tanggung jawab dan relevan terhadap wilayah target pencacahan. Dokumen pencacahan dilarang diisi oleh narasumber untuk menghindari kesalahan antara data dengan konsep dan definisi operasionalnya.

Penjaminan kualitas data dilaksanakan dengan *monitoring* dan evaluasi kegiatan pencacahan lapangan yang dilakukan secara berjenjang dan terus-menerus. Pada prinsipnya pengawasan dan pemeriksaan dilakukan untuk menjamin kelancaran pendataan dan kualitas data dalam hal kelengkapan, keakuratan, dan konsistensi isian. Pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan proses pendataan berlangsung sesuai rencana. Sedangkan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan akurasi dan konsistensi isian di kuesioner. Untuk membantu melakukan pengawasan di lapangan maka dibuat sebuah sistem monitoring untuk melihat *progress* pencacahan di lapangan melalui penggunaan SMS *Gateway* secara terpadu.

Secara khusus, publikasi ini berisi ringkasan eksekutif dari hasil pendataan Podes 2014 yang meliputi aspek-aspek berikut :

- 1) Pendahuluan
- 2) Keterangan Umum Desa/Kelurahan
- 3) Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- 4) Perumahan dan Lingkungan Hidup
- 5) Pendidikan dan Kesehatan
- 6) Sosial dan Budaya
- 7) Hiburan dan Olah Raga
- 8) Angkutan dan Komunikasi
- 9) Ekonomi
- 10) Keamanan



**KETERANGAN UMUM
DESA/KELURAHAN**

<http://kalingkopos.go.id>

BAB II

KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN

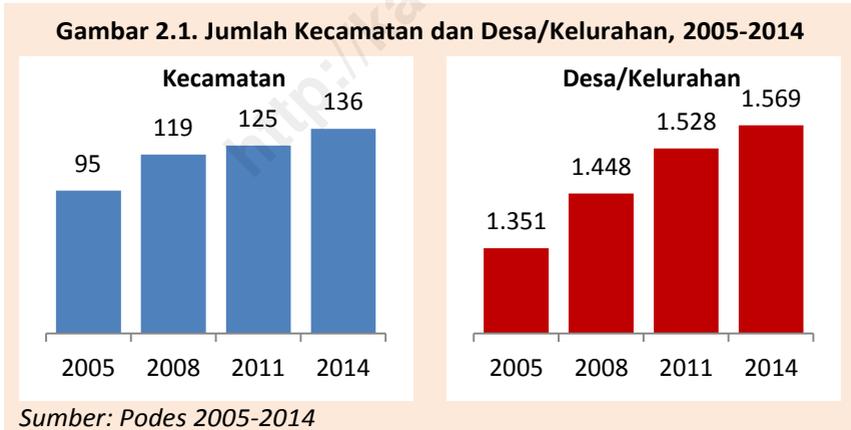
2.1. Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah

Podes 2014 dilakukan terhadap seluruh wilayah administrasi setingkat desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut. Desa memiliki pemerintahan sendiri dan hak untuk mengatur wilayahnya yang lebih luas. Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Kelurahan adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan (UU No. 32 Tahun 2004). Lurah diangkat oleh bupati/walikota. Wilayah administrasi pemerintahan terendah lainnya berupa Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT). Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang bersifat sementara dibentuk sekurang kurangnya 2 bulan sebelum transmigran

ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.22/MEN/IX/2007). Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigasi).

Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah, jumlah wilayah administrasi pemerintahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dari gambar 2.1 terlihat bahwa jumlah kecamatan terus bertambah dari 95 kecamatan pada 2005 menjadi 136 kecamatan pada 2014, sedangkan desa/kelurahan dari 1.351 desa/kelurahan menjadi 1.569 desa/kelurahan.



Dari tabel 2.1 terlihat bahwa wilayah administrasi pemerintahan terendah di Kalimantan Tengah tahun 2014 sebanyak 1.569, yang terdiri dari 1.427 desa, 138 kelurahan, dan 4 UPT/SPT. Keempat UPT/SPT tersebut tersebar di Kabupaten Kapuas (2 UPT/SPT) dan Barito Selatan (2 UPT/SPT).

Tabel 2.1. Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi Pemerintahan, 2014

Kabupaten/Kota	Desa	Kelurahan	UPT/SPT	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	81	13	-	94
Kotawaringin Timur	168	17	-	185
Kapuas	214	17	2	233
Barito Selatan	86	7	2	95
Barito Utara	93	10	-	103
Sukamara	29	3	-	32
Lamandau	80	3	-	83
Seruyan	97	3	-	100
Katingan	154	7	-	161
Pulang Pisau	95	4	-	99
Gunung Mas	115	12	-	127
Barito Timur	100	3	-	103
Murung Raya	115	9	-	124
Palangka Raya	-	30	-	30
Kalimantan Tengah	1 427	138	4	1 569

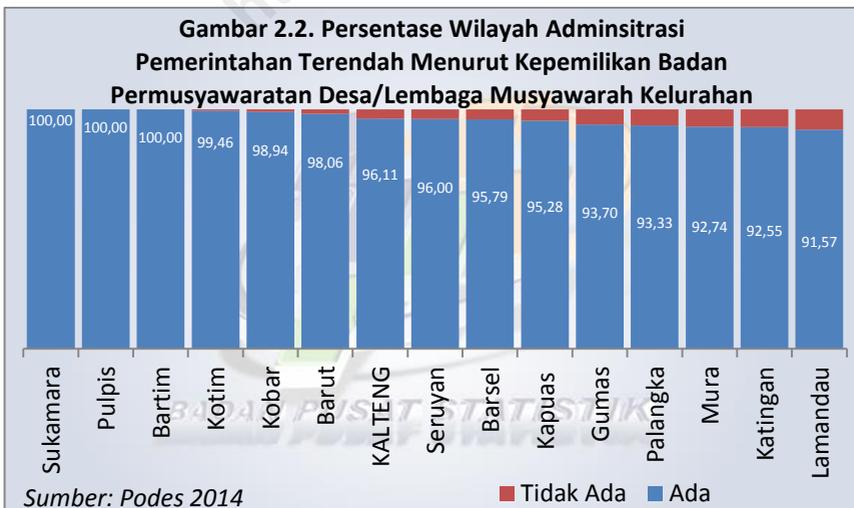
Sumber: Podes 2014

Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, terdiri dari ketua RW,

pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya (PP No. 72 Tahun 2005).

Sedangkan Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. LMK merupakan lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan yang bertujuan untuk membantu lurah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010).

Dari gambar 2.2 terlihat bahwa 96,11 persen wilayah administrasi pemerintahan terendah di Kalimantan Tengah sudah memiliki Badan Permasyarakatan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, dimana ada 3 kabupaten yang sudah 100 persen memiliki Badan Permasyarakatan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan yaitu Sukamara, Pulang Pisau, dan Barito Timur.



Dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan mengindikasikan bahwa masyarakat desa/kelurahan dapat berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa/kelurahan. Ini selaras dengan kaidah *check and balance* yang ingin diwujudkan oleh pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat.

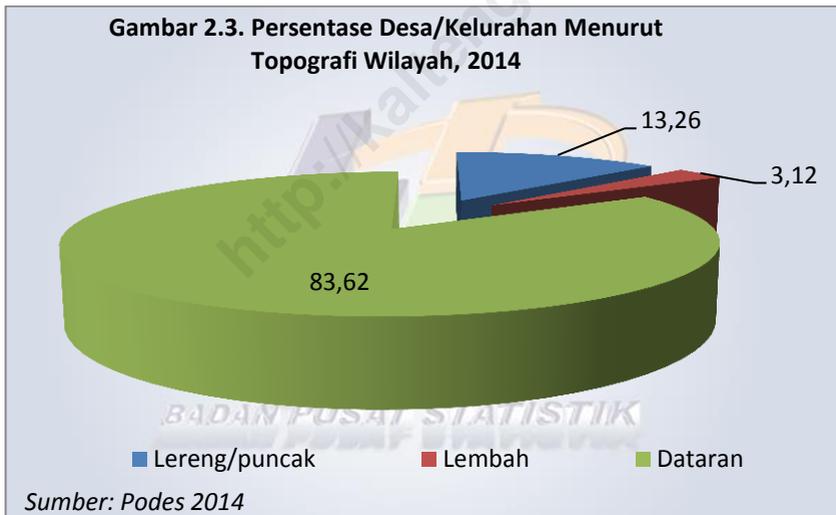
Tabel 2.2. Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan Terendah Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan, 2014

Kabupaten/Kota	Badan Permusyawaratan Desa		Lembaga Musyawarah Kelurahan		Jumlah
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	81	-	12	1	94
Kotawaringin Timur	168	-	16	1	185
Kapuas	210	6	12	5	233
Barito Selatan	85	3	6	1	95
Barito Utara	93	-	8	2	103
Sukamara	29	-	3	-	32
Lamandau	76	4	-	3	83
Seruyan	96	1	-	3	100
Katingan	142	12	7	-	161
Pulang Pisau	95	-	4	-	99
Gunung Mas	114	1	5	7	127
Barito Timur	100	-	3	-	103
Murung Raya	113	2	2	7	124
Palangka Raya	-	-	28	2	30
Kalimantan Tengah	1 402	29	106	32	1 569

Sumber: Podes 2014

2.2. Topografi Wilayah

Topografi desa/kelurahan dilihat berdasarkan letak sebagian besar wilayah desa/kelurahan, dibedakan menjadi lereng, lembah, dan dataran. Lereng adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung). Lembah adalah daerah rendah yang terletak di antara dua pegunungan atau dua gunung atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan daerah sekitarnya. Lembah di daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antar pegunungan. Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang.



Dari gambar di atas terlihat bahwa sebagian besar topografi wilayah desa/kelurahan di Kalimantan Tengah berupa dataran, mencapai 83,62 persen, sedangkan sisanya 13,26 persen berupa lereng/puncak dan 3,12 persen lembah. Jika kita lihat menurut kabupaten/kota wilayah yang banyak berupa lereng/puncak yaitu Gunung Mas dan Murung Raya (tabel 2.3).

Tabel 2.3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Topografi Wilayah, 2014

Kabupaten/Kota	Lereng/ Puncak	Lembah	Dataran	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	1	5	88	94
Kotawaringin Timur	8	2	175	185
Kapuas	5	4	224	233
Barito Selatan	-	-	95	95
Barito Utara	9	3	91	103
Sukamara	7	-	25	32
Lamandau	5	21	57	83
Seruyan	-	-	100	100
Katingan	1	-	160	161
Pulang Pisau	-	-	99	99
Gunung Mas	122	-	5	127
Barito Timur	6	1	96	103
Murung Raya	43	13	68	124
Palangka Raya	1	-	29	30
Kalimantan Tengah	208	49	1 312	1 569

Sumber: Podes 2014

Keberadaan hutan di Kalimantan Tengah juga merupakan berkah tersendiri. Hutan merupakan ekosistem alamiah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Keberadaan hutan di Kalimantan Tengah sangat penting tidak hanya untuk bangsa Indonesia tetapi juga bagi semua makhluk hidup di bumi. Hal ini wajar mengingat jumlah pepohonan yang ada di dalam kawasan hutan ini bisa mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia. Sayangnya, akhir-akhir ini kebakaran hutan semakin sering terjadi. Selain itu, potensi sumber daya alam

yang lain yaitu sumber daya laut yang jika dikelola dengan bijak dapat menjadi tumpuan pembangunan dan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan di daerah pesisir. Dari tabel 2.4 terlihat bahwa ada 8 kabupaten yang terdapat desa/kelurahan di tepi laut dan di semua kabupaten/kota ada desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan dengan hutan.

Tabel 2.4. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lokasi Wilayahnya Terhadap Laut dan Hutan, 2014

Kabupaten/Kota	Lokasi Terhadap Laut		Lokasi Terhadap Hutan		
	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Dalam Hutan	Sekitar Hutan	Luar Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	9	85	2	28	64
Kotawaringin Timur	4	181	20	55	110
Kapuas	4	229	2	57	174
Barito Selatan	-	95	2	93	-
Barito Utara	-	103	-	63	40
Sukamara	8	24	-	15	17
Lamandau	-	83	9	48	26
Seruyan	6	94	-	50	50
Katingan	7	154	11	104	46
Pulang Pisau	6	93	3	69	27
Gunung Mas	-	127	2	69	56
Barito Timur	-	103	-	18	85
Murung Raya	-	124	64	49	11
Palangka Raya	-	30	-	16	14
Kalimantan Tengah	44	1 525	115	734	720

Sumber: Podes 2014

The background features several overlapping orange circles of varying sizes and shades, connected by thin orange lines that create a network-like structure. The circles are arranged in a way that suggests a flow or connection between different elements.

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

<http://altengroups.go.id>

BAB III

KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

3.1. Sumber Penghasilan Utama Penduduk

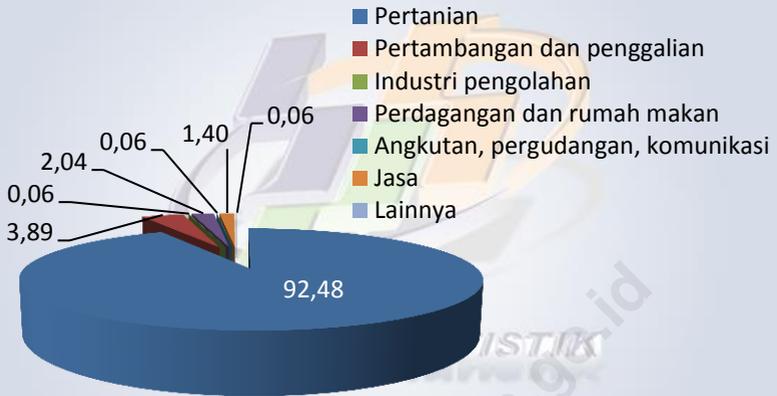
Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah sektor atau bidang usaha di mana sebagian besar penduduk memperoleh penghasilan/pendapatan. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk, meliputi:

- a) Pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan dan jasa pertanian.
- b) Pertambangan dan penggalian adalah kegiatan/lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu batuan, tanah liat, pasir, garam, mineral bahan kimia dan bahan pupuk, penambangan gips, aspal, dan lain-lain.
- c) Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar (barang mentah) menjadi barang setengah jadi atau jadi dan atau barang lain yang nilainya lebih tinggi, meliputi: industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit, industri barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga, industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan, industri kimia dan bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik, industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batu bara, industri logam dasar, industri barang dari logam, mesin dan peralatan, industri pengolahan lainnya, termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan.

- d) Perdagangan besar/eceran dan rumah makan adalah kegiatan jual beli barang (baru maupun bekas), termasuk usaha restoran/rumah makan dan minuman, katering, restorasi, kafetaria, kantin, warung, dan sebagainya.
- e) Angkutan, pergudangan, dan komunikasi. Angkutan mencakup kegiatan penyediaan sarana angkutan penumpang atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan sistem berjadwal, baik melalui darat, air maupun udara. Kegiatan lain seperti penyediaan fasilitas terminal, parkir, bongkar muat, dan lain-lain, dicakup sebagai kegiatan transportasi. Pergudangan mencakup usaha penyimpanan barang-barang sementara (bukan stok) sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial. Komunikasi meliputi kegiatan telekomunikasi, penyajian penerbitan, pos dan giro.
- f) Jasa adalah kegiatan layanan (*service*) atau penyediaan jasa meliputi: pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, serta pemerintahan dan perorangan.
- g) Lainnya adalah kegiatan yang bidang atau sektornya tidak termasuk pada rincian di atas, seperti air, gas, listrik, konstruksi/bangunan, perbankan, dan lain-lain.

Dari gambar 3.1 terlihat bahwa 92,48 persen desa/kelurahan sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya adalah sektor pertanian sedangkan sisanya 7,52 persen di sektor lain. Sekitar 3,89 persen desa/kelurahan sumber penghasilan sebagian besar penduduknya sektor pertambangan dan penggalian, 2,04 persen sektor perdagangan dan rumah makan, 1,40 persen sektor jasa, sedangkan sektor industri pengolahan, sektor angkutan, pergudangan, dan komunikasi, serta sektor lainnya masing-masing hanya 0,06 persen desa/kelurahan.

Gambar 3.1. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2014



Sumber: Podes 2014

Kemudian jika kita lihat lagi distribusinya menurut kabupaten/kota memang terlihat bahwa sebagian besar desa/kelurahan di tiap kabupaten/kota sebagian besar penghasilan utama penduduknya adalah sektor pertanian, bahkan di 10 kabupaten persentasenya mencapai lebih dari 90 persen, yaitu Kotawaringin Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, Pulang Pisau, Barito Timur, dan Murung Raya. Sedangkan yang sumber penghasilan utama sebagian besar penduduknya di sektor pertambangan dan penggalian yaitu desa/kelurahan di Kapuas dan Gunung Mas.

Tabel 3.1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk, 2014

Kabupaten/Kota	Sumber Penghasilan Utama *)							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kotawaringin Barat	84	1	-	6	1	2	-	94
Kotawaringin Timur	175	-	1	5	-	4	-	185
Kapuas	202	24	-	6	-	-	1	233
Barito Selatan	94	-	-	-	-	1	-	95
Barito Utara	100	-	-	2	-	1	-	103
Sukamara	31	-	-	-	-	1	-	32
Lamandau	83	-	-	-	-	-	-	83
Seruyan	98	-	-	1	-	1	-	100
Katingan	151	6	-	1	-	3	-	161
Pulang Pisau	95	2	-	2	-	-	-	99
Gunung Mas	101	23	-	3	-	-	-	127
Barito Timur	100	1	-	-	-	2	-	103
Murung Raya	117	3	-	-	-	4	-	124
Palangka Raya	20	1	-	6	-	3	-	30
Kalimantan Tengah	1 451	61	1	32	1	22	1	1 569

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Pertanian
 2. Pertambangan dan Penggalian
 3. Industri Pengolahan
 4. Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan
 5. Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi
 6. Jasa
 7. Lainnya

3.2. Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Tenaga kerja Indonesia (TKI) adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam

hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Jangka waktu tertentu ini biasanya ditandai dengan lamanya TKI tersebut tinggal di luar negeri, namun masih berstatus sebagai WNI. Sedangkan Agen pengerahan TKI ke luar negeri adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mencari, merekrut, menampung dan menyalurkan TKI untuk bekerja di luar negeri.

Tabel 3.2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan TKI dan Agen Pengerahan TKI, 2014

Kabupaten/Kota	TKI		Agen Pengerahan TKI	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	9	76	-	94
Kotawaringin Timur	8	162	-	185
Kapuas	23	181	1	232
Barito Selatan	1	80	-	95
Barito Utara	-	92	-	103
Sukamara	-	32	-	32
Lamandau	3	74	-	83
Seruyan	2	92	-	100
Katingan	1	150	-	161
Pulang Pisau	4	91	1	98
Gunung Mas	-	123	-	127
Barito Timur	1	95	1	102
Murung Raya	-	111	-	124
Palangka Raya	-	23	-	30
Kalimantan Tengah	52	1 382	3	1 566

Sumber: Podes 2014

Dari tabel 3.2 terlihat bahwa ada 52 desa/kelurahan yang ada warganya sedang bekerja sebagai TKI, desa-desa tersebut tersebar di 9

kabupaten, tertinggi di Kapuas yang mencapai 23 desa/kelurahan. Namun ada 5 kabupaten/kota yang tidak ada desa yang warganya menjadi TKI di luar negeri, yaitu Barito Utara, Sukamara, Murung Raya, dan Palangka Raya. Kemudian hanya 3 desa/kelurahan yang memiliki agen pengerahan TKI ke luar negeri, yaitu di Kapuas, Pulang Pisau, dan Barito Timur.

<http://kalteng.bps.go.id>

The background features several overlapping circles in various shades of orange. Two thin, dark orange lines cross each other, forming an 'X' shape that divides the page. The text is positioned to the left of the central intersection of these lines.

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

<http://kkteng.lps.go.id>

BAB IV

PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

4.1. Perumahan

4.1.1. Listrik

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang begitu pesat, kebutuhan energi listrik memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan. Peran penting tersebut, diantaranya untuk mendukung proses industrialisasi dimana energi listrik berfungsi sebagai bahan baku produksi dan bahan bakar. Tersedianya energi listrik dalam jumlah yang mencukupi akan ikut menentukan keberhasilan pembangunan terutama di era otonomi daerah sekarang ini.

Mengingat pentingnya peran listrik tersebut maka perlu diketahui aksesibilitas warga desa terhadap listrik. Keluarga pengguna listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN. Kemudian keluarga pengguna listrik non-PLN adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain dari PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan listrik swadaya masyarakat. Sedangkan keluarga tanpa listrik adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa baru 53,41 persen desa/kelurahan yang ada warganya menggunakan listrik PLN artinya masih ada 46,59 persen desa/kelurahan yang tidak ada warganya yang menggunakan listrik PLN. Selain itu, indikator penting lainnya mengenai ketersediaan sarana penerangan jalan, dimana dari gambar tersebut

terlihat bahwa baru 26,83 persen desa/kelurahan yang tersedia penerangan di jalan utamanya.



Dari tabel 4.1 terlihat bahwa belum semua desa mempunyai akses terhadap listrik PLN, hanya 838 desa/kelurahan yang ada warganya menggunakan listrik PLN. Ada 91 desa/kelurahan di Pulang Pisau (91,92 persen) yang sudah ada warganya yang menggunakan listrik PLN, dimana persentase ini tertinggi dibanding kabupaten/kota yang lain. Sedangkan desa/kelurahan yang ada keluarga pengguna listrik non PLN mencapai 68,77 persen (1.079 desa/kelurahan). Kemudian jika dilihat keberadaan penerangan jalan utama masih cukup banyak desa/kelurahan yang belum ada penerangan di jalan utama, yang sudah difasilitasi listrik pemerintah hanya 258 desa/kelurahan, dimana persentase tertinggi di Kota Palangka Raya yang mencapai 63,33 persen. Dengan kondisi tersebut diharapkan keberadaan sarana listrik bisa lebih merata di semua daerah, sehingga bisa mendukung proses pembangunan.

Tabel 4.1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Penerangan di Jalan Utama, 2014

Kabupaten/Kota	Keluarga Pengguna Listrik		Sumber Penerangan Jalan Utama		
	PLN	Non PLN	Listrik Pemerintah	Listrik Non Pemerintah	Non Listrik
			(4)	(5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	71	55	50	18	-
Kotawaringin Timur	106	133	27	26	-
Kapuas	146	128	35	11	-
Barito Selatan	47	62	17	7	2
Barito Utara	42	89	5	2	1
Sukamara	17	27	5	6	-
Lamandau	25	70	5	6	-
Seruyan	35	83	21	23	-
Katingan	80	105	18	8	-
Pulang Pisau	91	44	4	20	-
Gunung Mas	41	110	7	8	-
Barito Timur	87	50	36	8	-
Murung Raya	26	113	9	11	-
Palangka Raya	24	10	19	6	-
Kalimantan Tengah	838	1 079	258	160	3

Sumber: Podes 2014

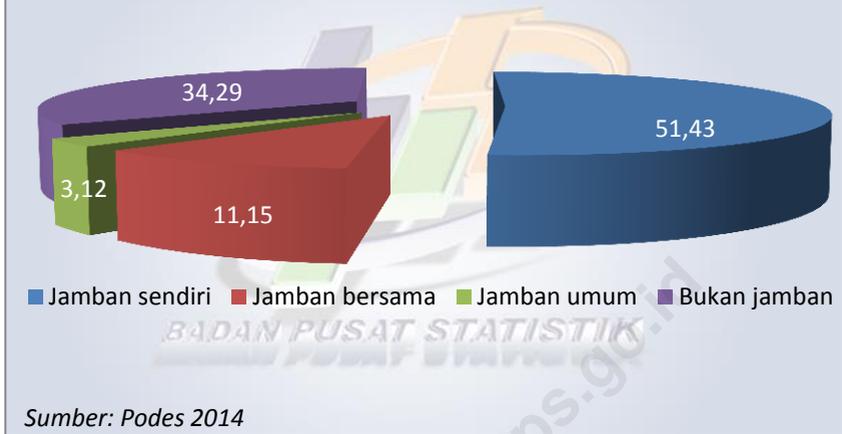
4.1.2. Fasilitas Tempat Tinggal

Rumah yang baik serta lingkungan yang sehat diharapkan dapat memberikan rasa nyaman bagi anggota rumah tangga yang menghuninya. Di daerah perkotaan pada umumnya perumahan penduduk relatif lebih baik bila dibandingkan dengan di daerah perdesaan. Pembangunan perumahan di daerah perkotaan dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang disamping untuk dipergunakan sebagai tempat tinggal/usaha juga dipandang dari segi

keindahan dan kelayakannya. Disamping itu pemerintah maupun badan-badan swasta yang bergerak dalam usaha penyediaan perumahan juga menyediakan rumah bagi penduduk dengan harga yang relatif murah.

Fasilitas perumahan yang tidak kalah pentingnya adalah tempat buang air besar atau jamban. Sistem pembuangan kotoran manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat resiko pencemaran yang mungkin ditimbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Keadaan jamban keluarga sangat erat hubungannya dengan kesehatan keluarga itu sendiri. Dengan demikian tersedianya fasilitas ini menandakan status dan kondisi tempat tinggal memenuhi syarat kesehatan lingkungan. Dari gambar 4.2 terlihat bahwa 51,43 persen desa/kelurahan tempat buang air besar sebagian besar warganya sudah di jamban sendiri, akan tetapi masih cukup banyak desa/kelurahan yang sebagian besar warganya buang air besar di bukan jamban yang mencapai 34,29 persen.

Gambar 4.2. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga, 2014



Kemudian jika kita lihat menurut kabupaten/kota persentase desa/kelurahan terbesar yang sebagian besar warganya membuang air besar di bukan jamban yaitu Murung Raya mencapai 66,94 persen (83 desa/kelurahan). Sedangkan di Kotawaringin Barat dan Palangka Raya tidak ada desa/kelurahan yang sebagian besar warganya membuang air besar di bukan jamban.

Tabel 4.2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga, 2014

Kabupaten/Kota	Jamban Sendiri	Jamban Bersama	Jamban Umum	Bukan Jamban	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	80	4	10	-	94
Kotawaringin Timur	101	47	3	34	185
Kapuas	131	28	5	69	233
Barito Selatan	40	9	2	44	95
Barito Utara	33	9	4	57	103
Sukamara	26	-	-	6	32
Lamandau	39	5	3	36	83
Seruyan	47	37	1	15	100
Katingan	57	18	3	83	161
Pulang Pisau	60	4	-	35	99
Gunung Mas	47	7	1	72	127
Barito Timur	92	5	2	4	103
Murung Raya	27	2	12	83	124
Palangka Raya	27	-	3	-	30
Kalimantan Tengah	807	175	49	538	1 569

Sumber: Podes 2014

Tempat pembuangan sampah mencakup dua hal yaitu tempat yang digunakan dan cara yang dilakukan untuk penanganan sampah. Keberadaan tempat penampungan sampah sementara (TPS) juga membantu menumbuhkan kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya. TPS yang dimaksud disini adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan/pembuangan sampah yang bersifat sementara sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir sampah.

Tabel 4.3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, Tempat Pembuangan Sampah Sebagian Besar Keluarga, dan Keberadaan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS), 2014

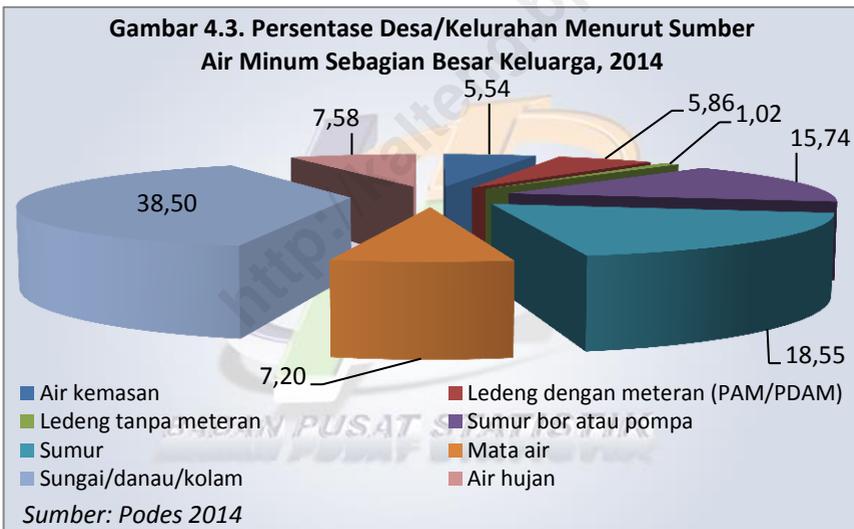
Kabupaten/Kota	Tempat Pembuangan Sampah					Ada TPS
	Tempat Sampah	Lubang/ Dibakar	Sungai/ Danau/ Laut	Drainase (Got/ Selokan)	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	11	78	4	-	1	18
Kotawaringin Timur	12	103	69	-	1	14
Kapuas	9	113	110	1	-	12
Barito Selatan	3	43	48	1	-	4
Barito Utara	5	41	50	2	5	8
Sukamara	5	22	4	-	1	6
Lamandau	2	68	10	2	1	6
Seruyan	3	58	39	-	-	7
Katingan	3	65	93	-	-	8
Pulang Pisau	1	62	34	1	1	4
Gunung Mas	4	66	44	1	12	8
Barito Timur	1	95	7	-	-	2
Murung Raya	9	40	62	1	12	9
Palangka Raya	10	20	-	-	-	10
Kalimantan Tengah	78	874	574	9	34	116

Sumber: Podes 2014

Jika dilihat pada tabel 4.3 hanya 78 desa/kelurahan yang sebagian besar warganya membuang sampah di tempat sampah, bahkan masih banyak desa/kelurahan yang sebagian besar warganya membuang sampah di sungai/danau/laut yaitu 574 desa/kelurahan, hal ini lah yang perlu menjadi perhatian kita bersama, bagaimana mengubah kebiasaan warga dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai untuk membuang

sampah, karena kalau kita lihat juga hanya 116 desa/kelurahan yang telah tersedia tempat penampungan sampah sementara (TPS).

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah. Dari gambar 4.3 terlihat bahwa mayoritas desa/kelurahan sumber air minumannya masih berasal dari sungai/danau/kolam yang mencapai 38,50 persen. Sedangkan 34,29 persen desa/kelurahan warganya menggunakan air sumur/sumur bor/pompa dan hanya 6,88 persen desa/kelurahan yang warganya menggunakan ledeng.



Penggunaan bahan bakar memasak oleh rumah tangga, selain terkait dengan unsur kesehatan juga terkait dengan kepedulian rumah tangga terhadap lingkungan. Semakin banyak rumah tangga yang menggunakan bahan bakar minyak tanah, kayu, briket, arang, dan jenis bahan bakar dari biomasa lainnya akan berdampak pada peningkatan polusi dan berkurangnya stok sumber daya alam. Pemerintah Indonesia telah berusaha melakukan

program konversi minyak tanah ke gas sejak tahun 2007 secara bertahap di seluruh Indonesia, walaupun sampai sekarang masih ada beberapa daerah yang belum terkena program konversi gas tersebut. Program konversi gas dilakukan dengan beberapa alasan, seperti semakin tingginya tingkat subsidi untuk penyediaan BBM terutama minyak tanah, peningkatan potensi nilai tambah minyak menjadi avtur, efisiensi penggunaan energi karena nilai kalor energi gas lebih tinggi daripada minyak tanah, dan kandungan karbon yang lebih kecil.

Dari tabel 4.4 terlihat bahwa 1.099 desa/kelurahan (70,04 persen) sebagian besar warganya masih menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak, 366 desa/kelurahan (23,33 persen) sebagian besar warganya masih menggunakan minyak tanah, dan hanya 104 desa/kelurahan (6,63 persen) yang sebagian besar warganya menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak. Masih tingginya warga yang menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar memasak tentu tidak baik bagi lingkungan, selain menimbulkan emisi karbon yang lebih banyak dibandingkan bahan bakar LPG, tentu juga akan mengurangi stok sumber daya alam khususnya kayu jika tidak dibarengi dengan penanaman kembali. Sedangkan masih sedikitnya warga yang menggunakan LPG sebagai bahan bakar untuk memasak mengindikasikan program konversi minyak tanah ke gas masih belum berhasil.

Tabel 4.4. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Bahan Bakar yang Digunakan Sebagian Besar Keluarga, 2014

Kabupaten/Kota	LPG	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	-	64	30	94
Kotawaringin Timur	1	59	125	185
Kapuas	52	41	140	233
Barito Selatan	2	21	72	95
Barito Utara	7	13	83	103
Sukamara	2	16	14	32
Lamandau	-	24	59	83
Seruyan	1	20	79	100
Katingan	-	17	144	161
Pulang Pisau	7	36	56	99
Gunung Mas	1	19	107	127
Barito Timur	20	17	66	103
Murung Raya	2	6	116	124
Palangka Raya	9	13	8	30
Kalimantan Tengah	104	366	1 099	1 569

Sumber: Podes 2014

4.2. Lingkungan Hidup

Air adalah segala sumber kehidupan. Semua makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan bisa hidup di bumi karena air dan udara yang ada di planet biru ini. Begitu pentingnya air bagi kehidupan. Bahkan 70 persen tubuh manusia terdiri atas air. Kekurangan air bisa menyebabkan dehidrasi yang berakibat fatal bagi tubuh. Melihat pentingnya air bagi kehidupan, maka tindakan menjaga kebersihan dan eksistensi sumber-sumber air adalah kebutuhan manusia. Sumber-sumber air yang terdapat di bumi yaitu sungai, laut, danau, dan sebagainya.

Tabel 4.5. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sungai, Saluran Irigasi, dan Danau/Waduk/Situ/Bendungan, 2014

Kabupaten/Kota	Sungai	Saluran Irigasi	Danau/Waduk/Situ/Bendungan
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	82	27	13
Kotawaringin Timur	171	53	4
Kapuas	213	62	10
Barito Selatan	94	11	17
Barito Utara	99	11	20
Sukamara	30	12	1
Lamandau	78	4	4
Seruyan	93	19	14
Katingan	161	25	22
Pulang Pisau	93	58	6
Gunung Mas	127	6	8
Barito Timur	99	14	29
Murung Raya	124	1	5
Palangka Raya	25	3	4
Kalimantan Tengah	1 489	306	157

Sumber: Podes 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir semua desa/kelurahan dilalui oleh sungai yaitu 1.489 desa/kelurahan atau mencapai 94,90 persen, 157 desa/kelurahan mempunyai danau/waduk/situ/bendungan dan 306 desa/kelurahan mempunyai saluran irigasi. Sehingga sudah sepatutnya sumber-sumber air tersebut kita jaga bersama.

Melihat potensi sumber air yang dimiliki, terutama sungai, wajar saja jika memegang peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Sungai yang ada bisa dimanfaatkan untuk mandi/cuci,

sumber air minum, pengairan/irigasi lahan pertanian, perikanan, pariwisata, transportasi, dan pembangkit listrik.

Tabel 4.6. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sungai Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Pemanfaatannya dan Keberadaan Pembuangan Limbah Pabrik ke Sungai, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Pemanfaatan				Ada Pembuangan Limbah Pabrik
	Mandi/Cuci	Sumber Air Minum	Pengairan/Irigasi Lahan Pertanian	Perikanan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	54	13	15	32	2
Kotawaringin Timur	154	103	43	78	28
Kapuas	198	158	111	87	52
Barito Selatan	91	78	15	65	21
Barito Utara	98	81	4	25	13
Sukamara	27	6	11	17	4
Lamandau	69	25	2	18	20
Seruyan	87	67	21	57	28
Katingan	150	100	27	112	81
Pulang Pisau	73	47	27	48	40
Gunung Mas	121	105	8	29	13
Barito Timur	85	36	15	28	11
Murung Raya	121	111	-	63	23
Palangka Raya	20	1	-	21	6
Kalimantan Tengah	1 348	931	299	680	342

Sumber: Podes 2014

Jika kita lihat tabel 4.6 hampir semua desa/kelurahan yang mempunyai sungai yaitu 1.348 desa/kelurahan yang memanfaatkan air sungai untuk mandi/cuci. Selain itu 931 desa/kelurahan memanfaatkan

air sungai sebagai sumber air minum, 299 desa/kelurahan memanfaatkan air sungai untuk pengairan/irigasi lahan pertanian, dan 680 desa/kelurahan memanfaatkan air sungai dalam sektor perikanan. Namun sayang disayangkan ternyata dari data yang ada terlihat bahwa masih ada pabrik/industri yang membuang limbahnya ke sungai, yang tentunya akan mencemarkan sungai dan menurunkan kualitas air sungai. Ada 342 desa/kelurahan yang terdapat pabrik/industri yang membuang limbahnya ke sungai, hal ini terjadi di semua kabupaten/kota. Limbah yang tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pencemaran sungai pada akhirnya akan menimbulkan pencemaran laut, karena sungai akan bermuara di laut. Hal ini patut menjadi perhatian bersama, mulai dari warga masyarakat sampai ke pemerintah agar kualitas lingkungan bisa terjaga dengan baik.

Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan tekanan bagi lingkungan alam. Semakin meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Semakin sempit dan mahalnya lahan yang dapat digunakan untuk perumahan memaksa penduduk tinggal di area marginal seperti bantaran sungai dan kumuh. Permukiman kumuh (slum area) merupakan wilayah permukiman dengan bangunan yang padat dan tidak layak huni, sanitasi lingkungan yang buruk dan padat penduduk.

Mengingat cukup banyaknya desa/kelurahan yang dilalui sungai, sehingga wajar saja jika kita lihat pada tabel 4.7 ada 1.012 desa/kelurahan yang terdapat permukiman di bantaran sungai, didukung kondisi geografis yang ada sehingga penduduk memilih untuk tinggal di sepanjang aliran sungai. Namun yang disayangkan masih ada 85 desa/kelurahan yang terdapat permukiman kumuh.

Tabel 4.7. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, Keberadaan Permukiman di Bantaran Sungai, Permukiman Kumuh, Kebiasaan Membakar Lahan, dan Lokasi Golongan C, 2014

Kabupaten/Kota	Permukiman		Kebiasaan Membakar Lahan	Lokasi Golongan C
	Bantaran Sungai	Kumuh		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	35	3	36	41
Kotawaringin Timur	122	20	105	37
Kapuas	183	17	75	20
Barito Selatan	76	5	59	31
Barito Utara	72	2	81	34
Sukamara	17	4	26	15
Lamandau	51	3	63	51
Seruyan	53	-	65	37
Katingan	107	14	135	46
Pulang Pisau	79	-	58	35
Gunung Mas	83	3	123	41
Barito Timur	43	-	78	28
Murung Raya	69	5	106	40
Palangka Raya	22	9	11	12
Kalimantan Tengah	1 012	85	1 021	468

Sumber: Podes 2014

Selain itu masih ada 1.021 desa/kelurahan yang terdapat kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun secara sengaja dengan maksud mempersiapkan usaha pertanian. Hal ini akan memperburuk kualitas udara akibat kabut asap yang dihasilkan, sebab rata-rata kawasan yang terbakar tidak lagi hutan alam, melainkan kawasan gambut sehingga akan menimbulkan dampak negatif yang luar biasa

bagi lingkungan dan makhluk hidup. Dari tabel tersebut juga terlihat ada 468 desa/kelurahan yang terdapat lokasi penggalian Golongan C (granit, kapur, kaolin, pasir kuarsa, dan lain-lain), kegiatan penggalian ini juga berpotensi merusak lingkungan hidup.

Tingkat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator kualitas lingkungan hidupnya. Baik buruknya kondisi lingkungan mempengaruhi baik buruknya kondisi kesehatan masyarakat. Kondisi lingkungan yang buruk dimana banyak terjadi pencemaran terhadap air, udara dan tanah berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan masyarakat menjadi rendah dan rentan terjangkit penyakit tertentu. Pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Zat atau bahan yang dapat mengakibatkan pencemaran disebut polutan. Suatu zat disebut polutan bila jumlahnya melebihi jumlah normal dan berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Sifat polutan ada dua, yaitu merusak untuk sementara dan merusak dalam jangka waktu lama.

Dari tabel 4.8 terlihat bahwa ada 970 desa/kelurahan (61,82 persen) yang tidak mengalami pencemaran lingkungan hidup, baik air, tanah maupun udara. Jumlah desa/kelurahan yang mengalami pencemaran air paling banyak dikeluarkan yaitu mencapai 523 desa/kelurahan, disusul oleh pencemaran udara yang dialami oleh 167 desa/kelurahan dan 51 desa/kelurahan yang mengalami pencemaran tanah.

Tabel 4.8. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup, 2014

Kabupaten/Kota	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tidak Ada Pencemaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	20	-	1	73
Kotawaringin Timur	57	4	25	117
Kapuas	55	8	14	170
Barito Selatan	21	8	14	70
Barito Utara	15	2	-	87
Sukamara	6	1	13	19
Lamandau	26	1	16	50
Seruyan	35	6	15	62
Katingan	105	1	23	43
Pulang Pisau	44	4	10	47
Gunung Mas	63	-	11	63
Barito Timur	39	10	12	60
Murung Raya	30	6	8	89
Palangka Raya	7	-	5	20
Kalimantan Tengah	523	51	167	970

Sumber: Podes 2014

The background features several overlapping circles in various shades of orange and brown. Thin, dark lines intersect to form a triangular shape in the upper left quadrant. A faint watermark URL is visible across the center.

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

<http://alteng.lps.go.id>

BAB V

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

5.1. Pendidikan

Faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara diantaranya adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu jalan bagi peningkatan kualitas SDM tersebut. Oleh sebab itu pemerintah secara terus menerus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan terutama pada tingkat dasar hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa antara lain terlihat dari semakin meningkatnya jumlah sekolah yang dibangun, dan pengangkatan tenaga guru dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut agaknya merupakan keharusan yang tidak dapat dihindari untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah yang selalu meningkat terus sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sesuai bunyi Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003, setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Jalur pendidikan di Indonesia terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang ketiganya dapat saling

melengkapi dan memperkaya (Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, seminari, dan bentuk lain yang sejenis.

Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung. Ditinjau dari fungsi atau perannya, sarana pendidikan dibedakan menjadi tiga macam yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media pengajaran. Sementara prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung terhadap kegiatan belajar mengajar, seperti bangunan dan alat perabot sekolah, serta penunjang pendidikan lainnya seperti transportasi menuju ke sekolah, biaya dan keringanannya. Mutu pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan merata hingga ke seluruh pelosok negeri.

di tabel 5.1 terlihat ada 721 desa/kelurahan memiliki Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, 225 desa/kelurahan memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat, 104 desa/kelurahan memiliki Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 21 desa/kelurahan memiliki akademi/ perguruan tinggi, 18 desa/kelurahan memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB), 96 desa/kelurahan memiliki Pondok Pesantren, 231 desa/kelurahan memiliki Madrasah Diniyah, dan 4 desa/kelurahan yang memiliki Seminari/ sejenisya. Kabupaten yang belum tersedia fasilitas akademi/ perguruan tinggi yaitu Sukamara, Pulang Pisau, Barito Timur, dan Murung Raya. Kemudian seminari/ sejenisya hanya tersedia di Lamandau, Katingan, dan Palangka Raya. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu Sekolah Luar Biasa masih belum tersedia di Sukamara, padahal fasilitas tersebut sangat diperlukan oleh warga penyandang difabel.

Perhatian Negara terhadap anak secara jelas tertuang dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28b, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Peletakan dasar-dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya serap dan daya cipta), emosi sosial (sikap, perilaku dan agama), serta bahasa dan komunikasi, perlu dilakukan sejak usia dini supaya anak dapat berkembang sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangannya. Sistem pendidikan anak usia dini (PAUD) dapat mengakomodir hal tersebut. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan

melalui jalur pendidikan formal (TK/RA/ sederajat), non formal (KB/TPA/ sejenisnya), dan/ atau informal (keluarga/ lingkungan). Pendidikan pada jenjang ini dapat disebut sebagai pendidikan pra sekolah.



Dari gambar di atas terlihat bahwa sekitar 72,59 persen desa/ kelurahan sudah tersedia Taman Kanak-Kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/ Bustanul Athfal (BA) yaitu 1.139 desa/kelurahan dan jika dilihat pada tabel 5.2 hampir semua desa/kelurahan di tiap kabupaten/kota memiliki TK/RA/ BA yaitu di atas 50 persen dari desa/kelurahan yang ada di tiap kabupaten/kota, dengan persentase tertinggi di Murung Raya yang mencapai 92,74 persen (115 desa/kelurahan). Sekitar 36,07 persen (566 desa/kelurahan) sudah tersedia pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 7,46 persen (117 desa/kelurahan) tersedia Kelompok Bermain (*play group*), 6,50 persen (102 desa/kelurahan) tersedia Taman Penitipan Anak (TPA). Secara rinci jumlah desa/kelurahan per kabupaten/kota yang memiliki fasilitas pendidikan pra sekolah bisa dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 5.2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Ketersediaan TK/RA/BA, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak (TPA), 2014

Kabupaten/Kota	TK/RA/BA	Pos PAUD	Kelompok Bermain	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	77	38	8	14
Kotawaringin Timur	121	27	13	24
Kapuas	162	119	6	4
Barito Selatan	77	52	4	6
Barito Utara	63	27	11	5
Sukamara	28	21	8	9
Lamandau	69	39	6	1
Seruyan	55	25	10	21
Katingan	91	67	19	3
Pulang Pisau	83	28	6	3
Gunung Mas	86	39	5	2
Barito Timur	89	23	2	3
Murung Raya	115	43	8	1
Palangka Raya	23	18	11	6
Kalimantan Tengah	1 139	566	117	102

Sumber: Podes 2014

Selain pendidikan formal yang tidak kalah pentingnya juga pendidikan nonformal, yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, misalnya pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan (paket A/B/C), dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Keaksaraan Fungsional adalah salah satu program pendidikan luar sekolah dalam rangka pemberantasan buta aksara yang meliputi pengajaran kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, serta kemampuan fungsional lainnya dalam kehidupan

sehari-hari seperti memasak, menjahit, pembuatan kain sulam, dan sebagainya. Sedangkan Bacaan Masyarakat (TBM) merupakan lembaga pembudayaan kegemaran membaca masyarakat yang lahir dari dan untuk masyarakat yang merupakan potensi dalam memberdayakan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi atau pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup.

Tabel 5.3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional, Pendidikan Paket A/B/C, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), 2014

Kabupaten/Kota	Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional	Pendidikan Paket A/B/C	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	3	21	25
Kotawaringin Timur	5	56	24
Kapuas	28	52	20
Barito Selatan	12	23	42
Barito Utara	8	34	22
Sukamara	7	24	22
Lamandau	10	25	16
Seruyan	15	22	16
Katingan	16	51	35
Pulang Pisau	2	28	10
Gunung Mas	5	40	7
Barito Timur	3	15	8
Murung Raya	20	47	5
Palangka Raya	3	10	21
Kalimantan Tengah	137	448	273

Sumber: Podes 2014

Dari tabel 5.2 terlihat bahwa hanya 137 desa/kelurahan yang ada kegiatan pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional yang tersebar di semua kabupaten/kota. Ada 448 desa/kelurahan yang tersedia pendidikan kesetaraan (paket A/B/C) sehingga bisa memberi kesempatan kepada anak-anak yang putus sekolah di pendidikan formal untuk bisa menyetarakan pendidikannya melalui paket A/B/C. Kemudian untuk membuka wawasan warga dalam memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan sudah ada 273 desa/kelurahan yang memiliki Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Selain ketiga macam pendidikan nonformal tersebut masih ada pendidikan nonformal yang tidak kalah pentingnya yaitu lembaga keterampilan. Lembaga keterampilan merupakan pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh lembaga/pelatihan/kursus keterampilan yang mempunyai ciri jangka waktu pendidikan relatif pendek, ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat umum, dan menyediakan sertifikat bagi peserta yang lulus.

Kegiatan kursus diatur berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 26. Dalam UU tersebut disebutkan kursus merupakan pendidikan non formal yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Kursus lebih diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 5.4. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Lembaga Keterampilan, 2014

Kabupaten/Kota	Lembaga Keterampilan *)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kotawaringin Barat	4	7	4	2	2	2	1	85
Kotawaringin Timur	4	8	4	2	1	1	1	174
Kapuas	-	3	3	1	1	1	2	228
Barito Selatan	2	5	1	1	1	1	-	89
Barito Utara	2	5	1	-	1	-	1	97
Sukamara	-	2	-	-	-	-	-	30
Lamandau	1	1	1	-	1	1	1	81
Seruyan	1	7	5	1	3	1	-	90
Katingan	4	6	-	-	-	-	-	154
Pulang Pisau	1	2	-	-	-	-	-	97
Gunung Mas	-	1	-	-	-	-	-	126
Barito Timur	2	2	2	-	-	-	3	97
Murung Raya	1	4	4	-	1	-	1	118
Palangka Raya	2	4	4	1	2	-	-	24
Kalimantan Tengah	24	57	29	8	13	7	10	1 490

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Bahasa Asing
 2. Komputer
 3. Menjahit/Tata Busana
 4. Kecantikan
 5. Montir Mobil/Motor
 6. Elektronika
 7. Lainnya
 8. Tidak Ada

Dari tabel 5.3 di atas terlihat masih cukup banyak desa/kelurahan yang belum tersedia lembaga keterampilan yaitu 1.490 desa/kelurahan (94,96 persen), bahkan kalau kita lihat lagi menurut kabupaten/kota, di Sukamara dan Gunung Mas hanya tersedia lembaga keterampilan komputer. Desa/kelurahan yang memiliki lembaga keterampilan komputer paling banyak jika dibandingkan lembaga keterampilan yang lain, yaitu 57 desa/kelurahan.

Desa/kelurahan yang memiliki lembaga keterampilan elektronika yang paling sedikit, hanya 7 desa/kelurahan, diikuti lembaga keterampilan kecantikan yang hanya ada di 8 desa/kelurahan. Ada 24 desa/kelurahan yang memiliki lembaga keterampilan bahasa asing yang tersebar di 11 kabupaten/kota, hanya di Kapuas, Sukamara, dan Gunung Mas yang tidak ada. Ada 13 desa/kelurahan yang memiliki lembaga keterampilan montir mobil/motor yang tersebar di 9 kabupaten/kota.

5.2. Kesehatan

Pembangunan manusia sebagai insan menekankan pada pendidikan yang tinggi, sehat jasmani dan rohani serta bergizi. Pembangunan manusia sebagai insan sekaligus sebagai sumber daya pembangunan dilakukan pada seluruh siklus hidup sejak dalam kandungan sampai dengan usia lanjut. Upaya pembangunan ini didasari oleh kualitas manusia yang baik yang ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan.

Sebagai upaya menciptakan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, pemerintah mencanangkan pembangunan kesehatan dengan tujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Prioritas pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2010–2014 adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, dengan delapan fokus prioritas diantaranya adalah peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; perbaikan status gizi masyarakat; pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular diikuti penyehatan lingkungan; pengembangan sumber daya manusia kesehatan; dan pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan.

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud

derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Secara definisi, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tentang kesehatan pasal 4 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mendapatkan haknya tersebut, setiap orang berkewajiban untuk ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

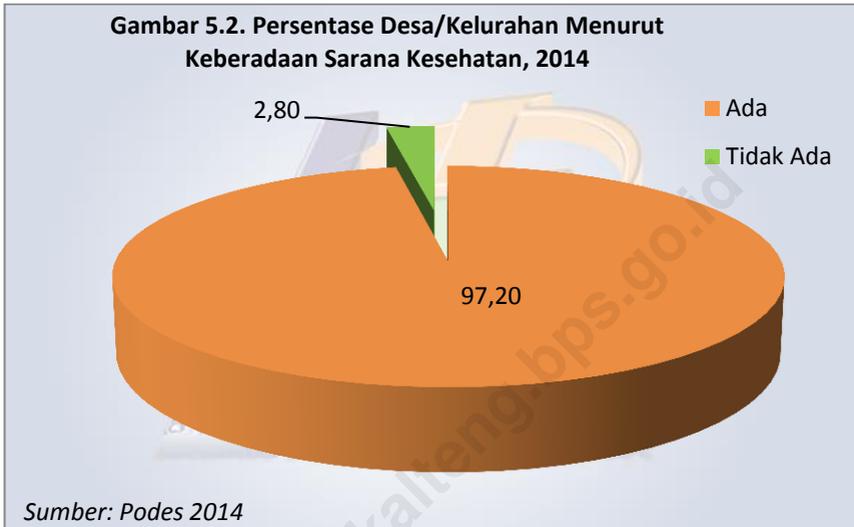
Sumber daya kesehatan merupakan faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Komponen sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersediaan sarana kesehatan yang cukup secara kuantitas dan kualitas serta bermutu. Sarana kesehatan yang tercakup di dalam Podes 2014 antara lain:

- 1) Rumah Sakit, yaitu sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.
- 2) Rumah Sakit Bersalin, yaitu rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan. Rumah Bersalin adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior. Biasanya Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin dikelola oleh swasta.

- 3) Puskesmas, yaitu unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang mempunyai fungsi utama sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan tingkat pertama. Wilayah kerja puskesmas maksimal adalah satu kecamatan dan untuk dapat menjangkau wilayah kerjanya, puskesmas mempunyai jaringan pelayanan yang meliputi unit Puskesmas Pembantu (Pustu), unit Puskesmas Keliling (Puskel), dan unit bidan desa/komunitas (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat).
- 4) Puskesmas Pembantu (Pustu) sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah yang berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan. Pustu bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan.
- 5) Poliklinik, yaitu sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu. Balai pengobatan adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.
- 6) Tempat Praktek Dokter, yaitu sarana kesehatan yang digunakan untuk tempat praktek dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan.
- 7) Tempat Praktek Bidan, yaitu sarana kesehatan yang digunakan untuk tempat praktek bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

- 8) Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), yaitu sarana kesehatan yang bersumber daya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka upaya mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Poskesdes dikelola oleh satu bidan dan minimal dua orang kader serta merupakan koordinator Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang ada.
- 9) Pondok Bersalin Desa (Polindes), yaitu bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa. Di samping pertolongan persalinan juga dilakukan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan masyarakat dan kompetensi teknis bidan tersebut.
- 10) Posyandu, yaitu salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.
- 11) Apotek, yaitu suatu tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat atau bahan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat yang dikelola oleh tenaga apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1332 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek).

- 12) Toko Khusus Obat/Jamu, yaitu tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu.



Dari gambar di atas terlihat bahwa masih ada 2,80 persen desa/kelurahan yang sama sekali belum tersedia sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang lebih rinci menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel 5.4. Terlihat bahwa di semua kabupaten/kota sudah tersedia rumah sakit, dimana sarana tersebut tersebar di 17 desa/kelurahan, sedangkan rumah sakit bersalin baru tersedia di 3 kabupaten/kota yang tersebar di 7 desa/kelurahan. Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan dasar baru ada di 200 desa/kelurahan dan didukung oleh puskesmas pembantu yang tersebar di 993 desa/kelurahan. Keberadaan sarana kesehatan yang lain yaitu poliklinik/balai pengobatan tersedia di 74 desa/kelurahan, tempat praktek dokter tersedia di 144 desa/kelurahan, tempat praktek bidan tersedia di 430 desa/kelurahan, poskesdes tersedia di 497 desa/kelurahan, polindes tersedia

di 430 desa/kelurahan, poskesdes tersedia di 297 desa/kelurahan, posyandu tersedia di 1.463 desa/kelurahan, apotek tersedia di 59 desa/kelurahan, dan toko khusus obat/jamu tersedia di 110 desa/kelurahan.

Tabel 5.5. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Kesehatan, 2014

Kabupaten/Kota	Sarana Kesehatan *)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kotawaringin Barat	1	3	17	76	13	16	60	36	42	94	9	14
Kotawaringin Timur	1	-	21	123	14	17	63	65	71	158	7	12
Kapuas	1	-	31	106	5	13	69	72	41	209	8	15
Barito Selatan	1	-	12	53	4	13	3	63	3	91	3	6
Barito Utara	1	1	16	80	3	6	6	14	15	100	2	4
Sukamara	1	-	5	29	3	7	18	24	-	32	2	5
Lamandau	1	-	9	69	1	8	34	16	36	83	3	4
Seruyan	2	-	12	52	12	8	16	40	21	79	5	9
Katingan	1	-	15	116	8	10	31	27	36	158	4	7
Pulang Pisau	1	-	11	72	2	7	45	41	15	98	3	7
Gunung Mas	1	-	16	48	-	6	22	30	2	106	3	10
Barito Timur	1	-	11	55	-	8	38	63	-	103	2	5
Murung Raya	1	-	14	89	3	18	14	2	3	122	1	3
Palangka Raya	3	3	10	25	6	7	11	4	12	30	7	9
Kalimantan Tengah	17	7	200	993	74	144	430	497	297	1 463	59	110

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Rumah Sakit

2. Rumah Sakit Bersalin

3. Puskesmas

4. Puskesmas Pembantu

5. Poliklinik/Balai Pengobatan

6. Tempat Praktek Dokter

7. Tempat Praktek Bidan

8. Pos Kesehatan Desa

9. Pondok Bersalin Desa

10. Posyandu

11. Apotek

12. Toko Khusus Obat/Jamu

Selain sarana kesehatan yang tidak kalah pentingnya juga tenaga kesehatan yang tersedia. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan bidang kesehatan dan melakukan upaya kesehatan untuk masyarakat umum baik secara langsung maupun tidak langsung, mencakup dokter (umum dan spesialis), dokter gigi, bidan, perawat, dan sebagainya. Menurut Permen Kemenkes No 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan terdiri dari:

- 1) Tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi.
- 2) Tenaga keperawatan meliputi perawat dan bidan.
- 3) Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker.
- 4) Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian.
- 5) Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien.
- 6) Tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara.
- 7) Tenaga keteknisan medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

Dengan adanya tenaga kesehatan yang tinggal/menetap di desa/kelurahan maka diharapkan warga dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan pengobatan. Jika kita lihat pada tabel 5.5 masih sedikit sekali desa/kelurahan yang ada dokter tinggal di desa/kelurahan tersebut, hanya 184 desa/kelurahan, yang kemungkinan menumpuk berdomisili di suatu desa/kelurahan, begitu juga halnya dokter gigi juga hanya tinggal di 75 desa/kelurahan. Ada 1.066 desa/kelurahan yang ada bidan yang tinggal di desa/kelurahan tersebut dan 902 desa/kelurahan yang ada tenaga kesehatan

lainnya yang tinggal di desa/kelurahan tersebut. Sedangkan sekitar 91, 33 persen (1.433 desa/kelurahan) ada dukun bayi/dukun bersalin/paraji yang tinggal di desa/ kelurahan tersebut.

Tabel 5.6. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi/Paraji yang Tinggal/Menetap di Desa/ Kelurahan, 2014

Kabupaten/Kota	Tenaga Kesehatan				Dukun Bayi/Paraji
	Dokter	Dokter Gigi	Bidan	Nakes Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	16	11	93	63	82
Kotawaringin Timur	21	8	129	130	179
Kapuas	16	8	137	92	198
Barito Selatan	11	9	65	47	89
Barito Utara	13	3	65	69	96
Sukamara	8	4	30	21	32
Lamandau	11	2	57	68	79
Seruyan	18	3	54	52	94
Katingan	15	3	110	91	150
Pulang Pisau	12	8	71	49	82
Gunung Mas	12	2	69	62	126
Barito Timur	8	4	64	55	81
Murung Raya	15	6	99	89	123
Palangka Raya	8	4	23	14	22
Kalimantan Tengah	184	75	1 066	902	1 433

Sumber: Podes 2014

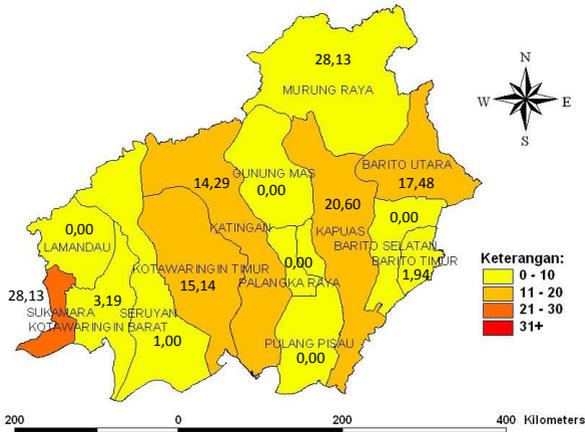
Kejadian Luar Biasa (KLB) merupakan timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan

yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010). Penetapan KLB menurut PMK No. 1501 tahun 2010 dapat dilakukan oleh:

- 1) Kepala dinas kesehatan Kabupaten/Kota,
- 2) Kepala dinas kesehatan provinsi, bila kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan daerahnya dalam keadaan KLB,
- 3) Menteri kesehatan, bila kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB.

Sedangkan wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah merupakan kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010). Penetapan wabah menurut PMK No. 1501 Tahun 2010 dapat dilakukan oleh menteri kesehatan.

Gambar 5.3. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/kota dan Keberadaan KLB/Wabah Penyakit, 2014



Dari gambar 5.3 terlihat bahwa 9,11 persen desa/kelurahan mengalami KLB/wabah penyakit dalam kurun waktu setahun terakhir, Sukamara dengan persentase tertinggi yang mencapai 28,13 persen. Sedangkan 5 kabupaten/kota tidak mengalami KLB/wabah penyakit yaitu Barito Selatan, Lamandau, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Palangka Raya.

Tabel 5.7. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis KLB/Wabah Penyakit *)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kotawaringin Barat	1	1	-	1	-	-	-	-	91
Kotawaringin Timur	18	13	1	10	-	-	-	-	157
Kapuas	29	19	2	24	-	1	1	2	185
Barito Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	95
Barito Utara	10	7	4	11	-	-	-	-	85
Sukamara	7	3	2	3	-	-	-	-	23
Lamandau	-	-	-	-	-	-	-	-	83
Seruyan	1	-	-	1	-	-	-	-	99
Katingan	12	3	-	16	-	2	-	-	138
Pulang Pisau	-	-	-	-	-	-	-	-	99
Gunung Mas	-	-	-	-	-	-	-	-	127
Barito Timur	-	-	-	-	-	-	-	2	101
Murung Raya	8	1	1	4	-	1	-	-	113
Palangka Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Kalimantan Tengah	86	47	10	70	-	4	1	4	1 426

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Muntaber/diare
 2. Demam Berdarah
 3. Campak
 4. Malaria
 5. Flu Burung/SARS
 6. Hepatitis E
 7. DPT (*Difteri Pertusis Tetanus*)
 8. Lainnya
 9. Tidak ada KLB/wabah

Tabel 5.6 memperlihatkan jenis KLB/wabah penyakit yang dialami desa/kelurahan tiap kabupaten/kota. Jika kita lihat menurut jenisnya, flu burung merupakan KLB/wabah penyakit yang tidak pernah dialami oleh semua desa/kelurahan, sedangkan yang paling sering adalah muntaber/diare yang dialami oleh 86 desa/kelurahan. KLB/wabah penyakit DPT hanya dialami oleh 1 desa di Kapuas, Hepatitis E dialami oleh 4 desa/kelurahan di Kapuas, Katingan, dan Murung Raya. KLB/wabah penyakit malaria dialami oleh 70 desa/kelurahan, demam berdarah dialami oleh 47 desa/kelurahan, dan campak dialami oleh 10 desa/kelurahan.

Asupan nutrisi yang lengkap dan seimbang sangat penting untuk tumbuh kembang balita. Balita yang mengkonsumsi makanan dengan proporsi gizi seimbang akan memiliki daya tahan tubuh yang baik dan tidak mudah terserang penyakit. Selain itu juga dapat mempercepat pertumbuhan fisik, perkembangan otak dan mental anak, serta balita biasanya akan lebih aktif dibandingkan dengan balita kurang gizi. Di Indonesia, relatif masih banyak balita yang kurang gizi. Masalah ekonomi sering kali menjadi penyebab utama balita kurang gizi. Pemerintah sudah berupaya untuk mengurangi balita kurang gizi, salah satunya adalah dengan mencanangkan gerakan nasional sadar gizi. Gerakan nasional sadar gizi merupakan realisasi dari keikutsertaan Indonesia di Scaling Up Nutrition (SUN) Movement yang merupakan gerakan global yang diinisiasikan oleh WHO. Status gizi balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB disajikan dalam tiga indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Untuk menilai status gizi balita, maka angka berat badan dan tinggi badan balita dikonversikan ke dalam bentuk nilai standar (*Z-score*) dengan menggunakan baku antropometri balita WHO 2005. Dari nilai *Z-score* tersebut akan diperoleh klasifikasi status gizi.

Tabel 5.8. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penderita Gizi Buruk Selama 3 Tahun Terakhir, 2014

Kabupaten/Kota	Ada	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	12	82	94
Kotawaringin Timur	36	149	185
Kapuas	24	209	233
Barito Selatan	15	80	95
Barito Utara	12	91	103
Sukamara	5	27	32
Lamandau	10	73	83
Seruyan	8	92	100
Katingan	25	136	161
Pulang Pisau	11	88	99
Gunung Mas	13	114	127
Barito Timur	7	96	103
Murung Raya	22	102	124
Palangka Raya	5	25	30
Kalimantan Tengah	205	1 364	1 569

Sumber: Podes 2014

Gizi buruk merupakan suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Busung lapar termasuk salah satu bentuk gizi buruk. Secara klinis, status gizi buruk terdapat tiga tipe, yaitu: marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor. Dari tabel 5.2 terlihat bahwa ada 205 desa/kelurahan yang terdapat penderita gizi buruk yang tersebar di semua kabupaten/kota. Selain pemenuhan ASI bagi balita, program kecukupan gizi juga sangat penting bagi balita, karena

kekurangan gizi pada balita akan mempengaruhi kecerdasan dan pertumbuhan anak. Kasus gizi buruk umumnya menimpa balita dengan latar belakang ekonomi kurang/lemah.

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses sumber daya bidang kesehatan. Negara telah berkomitmen untuk memberikan perlindungan sosial dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem ini adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial yang bertujuan menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, termasuk memperoleh jaminan kesehatan. Biaya kesehatan di Indonesia saat ini relatif masih mahal, dan kesehatan juga masih belum mendapat jaminan sepenuhnya dari pemerintah. Karena pentingnya kesehatan bagi setiap orang dan mahalnya biaya kesehatan, jaminan kesehatan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Namun, masyarakat masih belum menyadari pentingnya jaminan kesehatan. Dari tabel 5.7 terlihat bahwa hanya 1.332 desa/kelurahan yang terdapat warganya yang menerima kartu Jamkesmas/Jamkesda dan hanya 936 desa/kelurahan yang terdapat warganya yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Hal ini mengindikasikan masih cukup banyak warga yang belum memiliki jaminan kesehatan. Fenomena ini seharusnya menjadi perhatian semua pihak, khususnya pemerintah guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Juga, pemerintah harus menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan Surat Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dikeluarkan oleh 1.355 desa/kelurahan kepada warganya yang miskin untuk keperluan tertentu.

Tabel 5.9. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Warga Penerima Kartu Jamkesmas/Jamkesda, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), dan Peserta BPJS Kesehatan/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 2014

Kabupaten/Kota	Penerima Kartu Jamkesmas/Jamkesda	Penerima Surat Miskin/SKTM	Peserta BPJS Kesehatan/JKN
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	92	85	75
Kotawaringin Timur	170	166	19
Kapuas	164	202	54
Barito Selatan	94	83	95
Barito Utara	75	61	102
Sukamara	30	31	24
Lamandau	72	58	51
Seruyan	100	77	25
Katingan	114	147	57
Pulang Pisau	91	95	87
Gunung Mas	102	118	95
Barito Timur	101	98	102
Murung Raya	98	104	121
Palangka Raya	29	30	29
Kalimantan Tengah	1 332	1 355	936

Sumber: Podes 2014

The background features several overlapping circles in various shades of orange and brown. Thin, dark lines intersect to form a triangular shape that frames the central text. The overall aesthetic is clean and modern.

SOSIAL DAN BUDAYA

<http://kalteng.lps.go.id>

BAB VI

SOSIAL DAN BUDAYA

6.1. Keragaman Agama dan Suku/Etnis

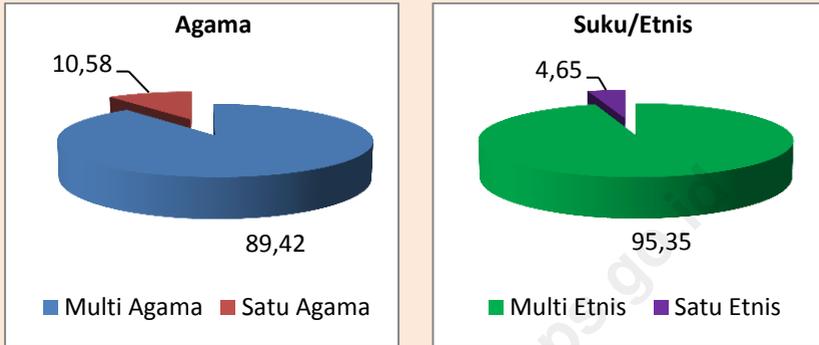
Salah satu tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan bangsa dengan memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendasar yaitu pangan, sandang, dan papan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran pokok yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Toleransi juga merupakan salah satu perwujudan modal sosial kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan di antara anggota masyarakat. Toleransi antar anggota masyarakat dapat menjamin hak setiap individu untuk bebas dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di komunitas dan hak-hak orang lain. Toleransi dalam kehidupan masyarakat desa dapat terlihat dari sikap toleransi terhadap kegiatan di lingkungan tempat tinggal yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang berbeda suku bangsa maupun berbeda agama.

Dari gambar 6.1 terlihat bahwa persentase desa/kelurahan yang terdiri dari multi agama mencapai 89,42 persen sedangkan yang terdiri dari satu agama saja hanya 10,58 persen. Kemudian jika kita lihat dari suku/etnis

maka 95,35 persen desa/kelurahan terdiri dari multi etnis dan hanya 4,65 persen desa/kelurahan yang terdiri dari satu etnis.

Gambar 6.1. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Keragaman Agama dan Suku/Etnis, 2014



Sumber: Podes 2014

Sebanyak 1.403 desa/kelurahan dihuni oleh warga multi agama dan 166 desa/kelurahan yang dihuni oleh warga satu agama. Hanya 3 kabupaten/kota yang semua desa/kelurahannya dihuni oleh warga yang multi agama, yaitu Lamandau, Gunung Mas, dan Palangka Raya (tabel 6.1). Kemudian jika dilihat dari suku/etnis warganya, ada 1.496 desa/kelurahan yang warganya multi etnis dan 73 desa/kelurahan yang warganya dari satu etnis. Sedangkan jika dilihat dari bahasa yang digunakan oleh warganya dalam komunikasi sehari-hari, ada 1.357 desa/kelurahan yang warganya berkomunikasi dengan multi bahasa dan 212 desa/kelurahan yang warganya berkomunikasi dengan satu bahasa. Wujud toleransi yang baik tercermin dari kehidupan masyarakat yang meskipun terdiri dari multi agama, multi etnis, dan multi bahasa dapat hidup berdampingan tanpa adanya konflik yang terjadi terkait perbedaan tersebut.

Tabel 6.1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keragaman Agama, Suku/Etnis, dan Bahasa, 2014

Kabupaten/Kota	Agama		Suku/Etnis		Bahasa	
	Satu Agama	Multi Agama	Satu Etnis	Multi Etnis	Satu Bahasa	Multi Bahasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	4	90	-	94	4	90
Kotawaringin Timur	42	143	14	171	15	170
Kapuas	42	191	7	226	37	196
Barito Selatan	14	81	4	91	9	86
Barito Utara	11	92	3	100	11	92
Sukamara	2	30	-	32	3	29
Lamandau	-	83	6	77	30	53
Seruyan	14	86	18	82	21	79
Katingan	10	151	13	148	30	131
Pulang Pisau	8	91	-	99	4	95
Gunung Mas	-	127	2	125	18	109
Barito Timur	12	91	2	101	19	84
Murung Raya	7	117	4	120	11	113
Palangka Raya	-	30	-	30	-	30
Kalimantan Tengah	166	1 403	73	1 496	212	1 357

Sumber: Podes 2014

6.2. Penyandang Cacat

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disebutkan bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, serta

penyandang cacat fisik dan mental. Penyandang cacat dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Tunanetra (Buta) adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Tunanetra dibedakan ke dalam dua golongan yaitu: buta total dan kurang awas. Buta total jika kedua mata tidak dapat melihat sama sekali. Kurang awas, bila dua mata tidak dapat menghitung jari-jari tangan yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.
- b) Tunarungu (tuli) adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.
- c) Tunawicara (bisu) adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.
- d) Tunarungu-wicara (tuli-bisu) adalah ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara dan berbicara. Seseorang menjadi bisu umumnya disebabkan karena tuli.
- e) Tunadaksa (cacat tubuh) adalah kelainan pada tulang, otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, serta kelumpuhan/ketidakkengkapan anggota gerak/tulang sehingga menimbulkan gangguan gerak.
- f) Tunagrahita (cacat mental/keterbelakangan mental) adalah kelainan/keterbelakangan mental/jiwa sehingga tidak mampu melakukan aktivitas yang umum dilakukan orang lain seusianya, contoh idiot.
- g) Tunalaras adalah hambatan/gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Seseorang eks sakit jiwa termasuk ke dalam kategori tunalaras.
- h) Cacat eks sakit kusta adalah kecacatan yang disebabkan oleh penyakit kusta/lepra yang secara medis sudah dinyatakan sembuh.

- i) Cacat ganda (cacat fisik-mental) adalah orang yang menderita cacat mental (tunagrahita atau tunalaras) dan cacat fisik (buta, tuli, bisu, bisu-tuli atau cacat tubuh).

Tabel 6.2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Penyandang Cacat dan Warga yang Dipasung, 2014

Kabupaten/Kota	Penyandang Cacat *)										Orang yang Dipasung
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kotawaringin Barat	48	55	48	31	58	66	26	9	9	1	9
Kotawaringin Timur	85	111	90	66	90	93	48	10	28	14	12
Kapuas	80	90	81	88	103	106	60	34	23	40	21
Barito Selatan	25	53	30	22	51	42	32	4	3	20	5
Barito Utara	50	58	57	29	62	45	26	-	9	7	5
Sukamara	16	21	18	8	22	19	7	5	1	2	2
Lamandau	53	47	36	28	63	39	23	4	14	2	5
Seruyan	29	38	37	25	42	31	28	1	7	32	6
Katingan	69	82	66	53	85	73	41	8	11	6	24
Pulang Pisau	45	51	47	32	64	74	34	9	5	2	5
Gunung Mas	45	70	46	41	64	61	57	9	8	8	23
Barito Timur	36	45	29	19	55	57	30	5	6	6	2
Murung Raya	49	71	64	40	81	64	50	1	8	11	13
Palangka Raya	7	10	8	8	14	18	4	-	4	10	-
Kalimantan Tengah	637	802	657	490	854	788	466	99	136	161	132

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Tunanetra

2. Tunarungu

3. Tunawicara

4. Tunarungu-wicara

5. Tunadaksa

6. Tunagrahita

7. Tunalaras

8. Cacat Eks Sakit Kusta

9. Cacat ganda

10. Tidak Ada Penyandang Cacat

Dari tabel di atas terlihat bahwa 1.408 desa/kelurahan (89,73 persen) terdapat warga penyandang cacat, hanya 161 desa/kelurahan yang tidak ada penyandang cacatnya. Jika dirinci menurut jenis cacatnya dapat dilihat bahwa ada 637 desa/kelurahan yang terdapat penyandang tunanetra, 802 desa/kelurahan yang terdapat penyandang tunarungu, 657 desa/kelurahan yang terdapat penyandang tunawicara, 490 desa/kelurahan yang terdapat penyandang tunarungu-wicara, 854 desa/kelurahan yang terdapat penyandang tunadaksa, 788 desa/kelurahan yang terdapat penyandang tunagrahita, 466 desa/kelurahan yang terdapat penyandang tunalaras, 99 desa/kelurahan yang terdapat penyandang cacat eks sakit kusta, dan 136 desa/kelurahan yang terdapat penyandang cacat ganda. Hanya 2 kabupaten/kota yang tidak terdapat penyandang cacat eks sakit kusta, yaitu Barito Utara dan Palangka Raya. Pemasangan terhadap penderita gangguan jiwa juga masih terjadi di 132 desa/kelurahan, hal ini terjadi di semua kabupaten kecuali Palangka Raya.

6.3. Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan merupakan sistem pengetahuan yang meliputi ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku misalnya pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni serta benda-benda nyata yang ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Kebiasaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat suatu daerah tertentu dikenal dengan istilah adat. Mereka biasanya merayakan atau memperingati hari-hari tertentu dengan mengadakan upacara adat. Kegiatan tersebut merupakan salah satu pelestarian budaya dan sejarah dimana upacara adat tersebut merupakan salah satu alat transisi budaya. Upacara adat adalah suatu upacara yang bersifat tradisional (ritus)/turun-temurun yang berhubungan dengan adat/kebiasaan/tradisi suatu masyarakat setempat, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara camas pusaka dan sebagainya. Upacara adat yang dilakukan di daerah juga merupakan unsur sejarah. Ada beberapa jenis upacara adat yang masih berkembang di beberapa daerah. Jenis upacara tersebut masih ada karena masyarakat masih memegang teguh adat istiadat para leluhur. Masyarakat desa yang umumnya masih menjunjung tinggi norma dan nilai-nilai dari budaya setempat diduga berperan penting terhadap tingginya indeks modal sosial di wilayah perdesaan.

Dari tabel 6.3 terlihat ada beberapa macam budaya/adat/kebiasaan masyarakat yang menjadi ciri masyarakat desa/kelurahan (kearifan lokal) dan masih dipertahankan yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, pencaharian/pekerjaan, alam/lingkungan hidup, perkawinan, kehidupan komunitas, kehidupan kebangsaan, kematian, dan gotong royong. Terlihat bahwa kebiasaan gotong royong masih dipegang teguh oleh sebagian besar warga di 1.525 desa/kelurahan. Budaya/adat/kebiasaan yang berkaitan dengan kelahiran ada di 1.198 desa/kelurahan, budaya/adat/kebiasaan yang berkaitan dengan kehamilan ada di 1.061 desa/kelurahan, budaya/adat/kebiasaan yang berkaitan dengan kematian ada di 955 desa/kelurahan, budaya/adat/kebiasaan yang berkaitan dengan perkawinan ada di 948 desa/kelurahan, budaya/adat/kebiasaan yang berkaitan dengan alam/lingkungan hidup ada di 415 desa/kelurahan, budaya/adat/kebiasaan yang

berkaitan dengan pencaharian/pekerjaan ada di 304 desa/kelurahan, budaya/adat/kebiasaan yang berkaitan dengan kehidupan komunitas ada di 190 desa/kelurahan, dan budaya/adat/kebiasaan yang berkaitan dengan kehidupan kebangsaan ada di 174 desa/kelurahan.

Tabel 6.3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Budaya/Adat/Kebiasaan Masyarakat, 2014

Kabupaten/Kota	Budaya/Adat/Kebiasaan Masyarakat *)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kotawaringin Barat	80	60	13	15	39	3	8	39	93
Kotawaringin Timur	147	148	16	33	111	19	22	113	173
Kapuas	131	169	29	51	100	12	51	120	219
Barito Selatan	45	84	9	21	72	15	22	70	94
Barito Utara	52	79	17	21	63	9	1	82	103
Sukamara	27	23	12	5	23	3	-	23	31
Lamandau	40	45	19	21	48	12	3	52	83
Seruyan	63	64	14	12	52	3	21	56	96
Katingan	105	113	47	54	93	44	30	92	158
Pulang Pisau	87	81	20	47	74	2	2	61	99
Gunung Mas	123	109	51	48	84	22	2	97	123
Barito Timur	35	95	24	33	82	31	-	43	102
Murung Raya	110	111	33	47	89	10	6	93	121
Palangka Raya	16	17	-	7	18	5	6	14	30
Kalimantan Tengah	1 061	1 198	304	415	948	190	174	955	1 525

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Kehamilan
 2. Kelahiran
 3. Pencaharian/Pekerjaan
 4. Alam/Lingkungan Hidup
 5. Perkawinan
 6. Kehidupan Komunitas
 7. Kehidupan Kebangsaan
 8. Kematian
 9. Gotong Royong

The background features a white space with several overlapping circles in various shades of orange. Two thin, dark orange lines cross each other in the upper left quadrant. A large, semi-transparent watermark URL is visible across the center of the page.

HIBURAN DAN OLAH RAGA

<http://id.teng.lps.go.id>

BAB VII

HIBURAN DAN OLAH RAGA

7.1. Hiburan

Tidak seperti makhluk hidup lain yang dapat bertahan hidup hanya dengan memenuhi kebutuhan primernya saja, manusia, membutuhkan hal-hal lain untuk tetap bertahan hidup dan bahagia dalam menjalani kehidupannya. Salah satu hal yang sangat dibutuhkan manusia adalah mendapatkan hiburan. Sejak dulu manusia sudah mulai berkreasi dengan berbagai hiburan untuk melengkapi hidup mereka. Musik, seni, olah raga, semua pertunjukan dan pertandingan tersebut dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan hiburan. Beberapa manfaat hiburan antara lain dapat membuat kondisi fisik dan psikis segar kembali, memberikan inspirasi, media untuk berinteraksi, menonjolkan kepribadian dan keunikan seseorang.

Berbagai jenis hiburan dan seni selalu menjadi sumber inspirasi bagi karya-karya terbaik di generasi yang akan datang. Manusia adalah makhluk sosial yang butuh interaksi dan pengakuan. Salah satu media yang paling efektif bagi manusia untuk melakukan interaksi dengan manusia lain adalah dengan menggunakan hiburan sebagai hiburan. Menyukai musik tertentu, film tertentu, buku tertentu, kepribadian dan keunikan seseorang dapat terbentuk dari hiburan-hiburan yang disukainya. Hiburan sering memberikan kesenangan, kenikmatan, dan tawa, pada waktu tertentu ada juga tujuan tambahan yang serius.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan masyarakat akan sarana informasi dan hiburan dirasakan semakin meningkat. Oleh karena itu keberadaan ruang publik terbuka yang peruntukan utamanya sebagai tempat bagi warga untuk bersantai/bermain tanpa perlu

membayar sangat berguna sebagai sarana hiburan masyarakat. Dari tabel 7.1 terlihat bahwa ruang publik terbuka telah tersedia di 390 desa/kelurahan. Sedangkan bioskop sebagai sarana hiburan yang lain hanya tersedia di 2 desa/kelurahan yang ada di Kotawaringin Barat dan Palangka Raya. Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan malam sebagai tempat untuk melepas lelah, umumnya berupa rumah makan atau restoran yang dilengkapi hotel serta sarana hiburan seperti musik dan karaoke. Terlihat bahwa pub/diskotik/ tempat karaoke terdapat di 54 desa/kelurahan.

Tabel 7.1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Ruang Publik Terbuka, Bioskop, dan Pub/Diskotik/ Karaoke, 2014

Kabupaten/Kota	Ruang Publik Terbuka	Bioskop	Pub/Diskotik/ Karaoke
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	61	1	5
Kotawaringin Timur	70	-	6
Kapuas	28	-	7
Barito Selatan	27	-	2
Barito Utara	10	-	4
Sukamara	16	-	3
Lamandau	19	-	1
Seruyan	25	-	3
Katingan	61	-	2
Pulang Pisau	12	-	3
Gunung Mas	42	-	5
Barito Timur	6	-	6
Murung Raya	5	-	1
Palangka Raya	8	1	6
Kalimantan Tengah	390	2	54

Sumber: Podes 2014

7.2. Olah Raga

Kegiatan olah raga perlu ditanamkan dan dikembangkan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah air, dalam usaha memasyarakatkan olah raga dan mengolah ragakan masyarakat. Olah raga dilakukan tidak hanya semata-mata mengisi waktu senggang atau hanya sekedar memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Ada empat dasar tujuan manusia melakukan kegiatan olah raga sekarang ini yaitu: (a) mereka melakukan olah raga untuk rekreasi, (b) tujuan pendidikan, (c) mencapai tingkat kesegaran jasmani tertentu, (d) mencapai sasaran atau prestasi tertentu.

Olah raga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani. Dewasa ini olah raga sudah merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam berolah raga tiap-tiap individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, ada yang bertujuan untuk prestasi, kesegaran jasmani, rekreasi, maupun untuk memperoleh nilai khususnya pada anak-anak sekolah. Dalam melakukan olah raga, seseorang dapat melakukan berbagai jenis olah raga, namun pada umumnya jenis olah raga yang sering dilakukan terbatas pada jenis olah raga yang paling disukai. Berikut ini beberapa manfaat olah raga:

- a) Meningkatkan kapasitas otak. Berolah raga meningkatkan energi dan menambah serotonin dalam otak. Serotonin adalah hormon di otak yang berfungsi sebagai modulator kapasitas kerja otak yang mencakup pengatur stabilitas emosi, pemahaman dan nafsu makan. Jadi orang yang melakukan olah raga dengan jumlah cukup akan menemukan produktivitas mereka meningkat. Produktivitas seseorang tidak hanya berarti orang tersebut dapat memberikan kualitas kerja yang baik, namun ia juga dapat memberikan kontribusi untuk suasana kerja yang bahagia di tempat kerja.

- b) Menggerakkan tubuh membantu mencairkan stres. Berolah raga memberikan efek relaksasi yang baik untuk semua orang. Itu sebabnya ketika seseorang mulai berlatih, dia akan segera mengetahui bahwa hal itu akan mengurangi stres dan membuatnya menjadi pribadi yang lebih bahagia. Ketika seseorang bahagia, efeknya tidak hanya menguntungkan orang itu sendiri. Kondisi ini menyebabkan orang tersebut menjadi tidak mudah marah, dengan demikian, meningkatkan kualitas hubungan dengan rekan-rekan kerjanya, keluarga dan orang lain.
- c) Memberikan energi. Berolah raga, meskipun hanya 30 menit sehari, dapat mengubah hari seseorang dari pagi sampai malam hari. Ketika endorfin dilepaskan ke dalam darah selama berolah raga, seseorang akan merasa lebih energik sepanjang hari. Endorfin adalah senyawa kimia dalam otak kita yang dapat membuat otak menjadi rileks.
- d) Membina hubungan. Berolah raga meningkatkan hubungan dengan orang lain. Jika hal itu dilakukan bersama keluarga, maka akan merasakan lebih dekat dengan mereka. Hal ini juga berlaku jika berolah raga bersama dengan teman-teman. Selain itu, sangat mungkin mendapatkan teman-teman baru melalui berolah raga. Orang-orang yang mencoba untuk mengurangi berat badannya, benar-benar membutuhkan dukungan dari teman-teman agar usahanya tersebut berhasil.
- e) Melawan penyakit. Penelitian menunjukkan bahwa berolah raga dapat memperlambat dan mencegah penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, osteoporosis dan banyak penyakit lainnya. Berolah raga bahkan bisa memperlambat proses penuaan dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dengan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik, setidaknya bisa mengurangi kemungkinan terkena penyakit flu dan penyakit umum lainnya.

- f) Memompa jantung lebih baik. Berolah raga membuat jantung kuat. Fungsi jantung dan sistem kardiovaskular bekerja lebih efektif, dan ini dapat mengurangi plak dalam pembuluh darah (yang dapat mempersempit aliran darah), sehingga jantung akan memompa darah lebih baik. Jika jantung menjadi lebih kuat, masing-masing pompa akan memberikan sejumlah besar darah dan ini dapat memperlambat detak jantung.
- g) Memperbaiki diet. Otot membakar lebih banyak kalori daripada lemak tubuh ketika sedang beristirahat. Dengan demikian, semakin banyak otot yang kita miliki, semakin baik metabolisme yang kita alami. Tentu pembakaran kalori tidak hanya terjadi ketika berada dalam kondisi beristirahat, tetapi ketika berolah raga juga. Dengan tingkat metabolisme yang baik, seseorang dapat memiliki pola makan yang sehat. Selama tidak terlalu berlebihan, setiap makanan favorit dapat dikonsumsi.
- h) Meningkatkan stamina. Setelah dilakukan selama beberapa minggu secara konsisten, seseorang dapat merasakan perbedaan dalam tubuhnya. Otot-otot telah dikembangkan dan perkembangan ini dapat dirasakan ketika ia melakukan tenis, golf, bola basket atau olah raga lain yang membutuhkan kekuatan otot. Pada saat itu penambahan kekuatan yang berasal dari otot-otot bisa dirasakan. Selain itu, otot-otot akan dapat bekerja lebih efisien, lebih cepat bereaksi dan daya tahannya juga akan meningkat.
- i) Penurunan berat badan bukan tujuan utama. Berolah raga memang menurunkan beberapa kilo dari tubuh, namun manfaat dari berolah raga tidak hanya untuk mencegah kelebihan berat badan. Menggunakan olah raga hanya sebagai alat untuk menurunkan berat badan tidak akan menjadi motivator yang kuat bagi seseorang untuk berhasil. Hal ini terjadi karena orang biasanya tidak sabar dan ingin melihat hasilnya dalam sekejap. Penurunan berat badan melalui olah raga tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

j) Membuat tidur nyenyak. Olah raga selain membakar lemak juga membuat lelap tidur. Alasannya setelah kegiatan fisik, kelelahan setelah itu akan membuat lebih lelap tidur. Jika tidur dengan nyenyak maka konsentrasi akan terjaga dan tubuh akan menjadi bugar.

Akan tetapi faktanya pada kehidupan sekarang adalah masyarakat enggan olahraga dikarenakan masyarakat sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan tidak sempat olah raga, ini adalah cara hidup yang tidak sehat dimana keseimbangan aktivitas dengan pola makan dan tidak adanya olah raga akan mengakibatkan tidak adanya keseimbangan di dalam tubuh. Aktivitas hidup antara pekerjaan dengan pola makan seperti otak dan tenaga sering kali terkuras di pekerjaan orang/perorangan di suatu masyarakat, ini mengakibatkan daya tahan tubuh akan menurun dan pola makan yang tidak teratur ataupun makanan yang tidak sehat itu juga akan mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit di dalam tubuh dan kita sendiri yang akan merasakannya, itu semua akan bisa terhindar jika kita mengatur konsep hidup sehat dimana kita bekerja dengan waktu yang cukup, makan dengan teratur dan mengkonsumsi makanan yang berserat bagus.

Dari tabel 7.2 terlihat bahwa masih ada 78 desa/kelurahan yang belum mempunyai sarana olah raga yang tersebar di 12 kabupaten. Hanya Sukamara dan Palangka Raya yang semua desa/kelurahannya telah tersedia sarana olah raga. Lapangan bola voli merupakan sarana olah raga terbanyak yang ada, yaitu 1.389 desa/kelurahan yang mempunyai sarana olah raga bola voli ini. Kemudian jika diurutkan dari sarana olah raga yang paling banyak terdapat di desa/kelurahan yaitu, 943 desa/kelurahan tersedia sarana olah raga sepak bola, 921 desa/kelurahan tersedia sarana olah raga bulu tangkis, 665 desa/kelurahan tersedia sarana olah raga tenis meja, 334 desa/kelurahan tersedia sarana olah raga bilyard, 226 desa/kelurahan tersedia sarana olah raga bela diri, 86 desa/kelurahan tersedia sarana olah

raga futsal, 81 desa/kelurahan tersedia sarana olah raga bola basket, 57 desa/kelurahan tersedia sarana *fitness center*, 47 desa/kelurahan tersedia sarana olah raga tenis lapangan, dan 15 desa/kelurahan tersedia sarana olah raga renang.

Tabel 7.2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Olah Raga, 2014

Kabupaten/Kota	Sarana Olah Raga *)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kotawaringin Barat	88	90	69	9	10	61	8	4	34	25	6	-
Kotawaringin Timur	131	159	86	11	8	83	5	4	42	12	12	14
Kapuas	100	163	131	7	3	74	5	2	16	61	1	33
Barito Selatan	51	88	78	4	3	52	8	-	8	24	1	5
Barito Utara	62	96	76	10	1	54	16	1	5	13	5	2
Sukamara	29	31	17	2	1	26	3	-	6	13	5	-
Lamandau	66	72	34	1	2	37	1	-	20	8	4	7
Seruyan	81	90	48	4	5	42	4	-	15	5	1	3
Katingan	116	153	55	10	3	49	3	-	11	34	6	4
Pulang Pisau	74	96	63	5	2	41	5	-	25	38	3	1
Gunung Mas	38	121	69	4	4	32	1	-	6	58	2	3
Barito Timur	58	85	86	5	1	49	5	-	12	33	4	3
Murung Raya	31	118	84	5	1	54	13	-	18	3	3	3
Palangka Raya	18	27	25	4	3	11	9	4	8	7	4	-
Kalimantan Tengah	943	1 389	921	81	47	665	86	15	226	334	57	78

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Sepak Bola

2. Bola Voli

3. Bulu Tangkis

4. Bola Basket

5. Tenis Lapangan

6. Tenis Meja

7. Futsal

8. Renang

9. Bela Diri

10. Bilyard

11. Pusat Kebugaran (*Fitness*)

12. Tidak ada

The image features a white background with several overlapping orange circles of varying sizes and shades. Two thin, dark orange lines cross each other in the upper left quadrant. A large, semi-transparent watermark URL is visible diagonally across the center.

ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

<http://kelteng.lps.go.id>

BAB VIII

ANGKUTAN DAN KOMUNIKASI

8.1. Angkutan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan perekonomian masyarakat dan perkembangan wilayah baik itu daerah pedesaan maupun daerah yang lainnya. Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi di daerah ini menyebabkan pengurangan konsentrasi tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan ketrampilan pada wilayah tertentu, selain itu transportasi juga untuk membuka peluang kegiatan perdagangan antar wilayah dan mengurangi perbedaan antar wilayah sehingga mendorong terjadinya pembangunan antar wilayah. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya merata di semua daerah.

Transportasi sangat penting perannya bagi daerah baik itu pedesaan atau daerah semi urban atau urban di negara-negara yang sedang berkembang, karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Akses terhadap informasi, pasar, dan jasa masyarakat dan lokasi tertentu, serta peluang-peluang baru kesemuanya merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pembangunan.

Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan

pada kawasan yang mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta pemerataan pembangunan.

Suatu wilayah tertentu bergantung pada wilayah lain. Demikian juga wilayah lain memiliki ketergantungan pada wilayah tertentu. Diantara wilayah-wilayah tersebut, terdapat wilayah-wilayah tertentu yang memiliki kelebihan dibanding yang lain sehingga wilayah tersebut memiliki beberapa fasilitas yang mampu melayani kebutuhan penduduk dalam radius yang lebih luas, sehingga penduduk pada radius tertentu akan mendatangi wilayah tersebut untuk memperoleh kebutuhan yang diperlukan.

Pada dasarnya, sistem transportasi dikembangkan untuk menghubungkan dua lokasi guna lahan yang mungkin berbeda. Transportasi digunakan untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga mempunyai nilai ekonomi yang lebih meningkat. Dengan transportasi yang baik, akan memudahkan terjadinya interaksi antara penduduk lokal dengan dunia luar. Keterisolasian merupakan masalah pertama yang harus ditangani.

Transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan konsumen dan meniadakan jarak diantara keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan sebagai jarak waktu maupun jarak geografis. Jarak waktu timbul karena barang yang dihasilkan hari ini mungkin belum dipergunakan sampai besok. Jarak atau kesenjangan ini dijabatani melalui proses penggudangan dengan teknik tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang bersangkutan.

Perbedaan sumber daya yang ada di suatu daerah dengan daerah lain mendorong masyarakat untuk melakukan mobilitas sehingga dapat memenuhi

kebutuhannya. Dalam proses mobilitas inilah transportasi memiliki peranan yang penting untuk memudahkan dan memperlancar proses mobilitas tersebut. Proses mobilitas ini tidak hanya sebatas oleh manusia saja, tetapi juga barang dan jasa. Dengan demikian nantinya interaksi antar daerah akan lebih mudah dan dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah.

Transportasi merupakan penghubung utama antara dua daerah yang sedang berinteraksi dalam pembangunan. Tanpa adanya jaringan transportasi tidak mungkin pembangunan dapat diperkenalkan ke luar daerah. Jalan merupakan akses transportasi dari suatu wilayah menuju ke wilayah. Aktivitas penduduk yang meningkat perlu dijadikan perhatian dalam merumuskan kebijakan di bidang transportasi karena manusia senantiasa memerlukan transportasi. Hal ini merupakan sesuatu hal yang merupakan ketergantungan sumber daya antar tempat. Hal ini menyebabkan proses interaksi antar wilayah yang tercermin pada fasilitas transportasi. Transportasi merupakan tolok ukur interaksi antar wilayah.

Transportasi sering dikaitkan dengan aksesibilitas suatu wilayah. Dalam pembangunan perdesaan keberadaan prasarana dan sarana transportasi tidak dapat diabaikan dalam suatu rangkaian program pembangunan. Terjadinya proses produksi yang efisien, selalu didukung oleh sistem transportasi yang baik, investasi dan teknologi yang memadai sehingga tercipta pasar dan nilai.

Aksesibilitas yang baik juga akan mendorong minat swasta dan masyarakat untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan wilayah. Dengan demikian akan memajukan kegiatan perekonomian masyarakat, dan dapat mengentaskan atau setidaknya dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah yang memiliki potensi sama atau berbeda. Semakin baik suatu jaringan transportasi maka aksesibilitasnya juga semakin baik sehingga kegiatan ekonomi juga semakin berkembang.

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya transportasi sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu daerah. Tiap daerah, bagaimanapun tingkatan perkembangan ekonominya, dalam rangka menyusun sistem transportasi harus menentukan terlebih dahulu tujuan-tujuan yang membutuhkan jasa angkutan dalam sistem transportasi.

Fungsi transportasi adalah untuk mengangkut penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang artinya seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha. Faktor-faktor kebutuhan ekonomis yang berhubungan dengan angkutan dari suatu jenis barang, tergantung daripada sifat barang dan kegunaan ekonomisnya. Jadi transportasi menciptakan kegunaan tempat dengan mengangkut suatu jenis barang dari suatu tempat ke tempat yang bersangkutan. Harga barang dan jasa pada hakikatnya dipengaruhi oleh permintaan akan barang dan jumlah barang yang tersedia. Biaya merupakan unsur penting dalam produksi barang yang merupakan faktor pendorong bagi produksi barang jadi.

Transportasi mempunyai peranan sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang segala aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Transportasi di Kalimantan Tengah baik melalui darat, air (sungai & laut) maupun udara menjadi kian penting dengan adanya pemekaran kabupaten/kota yang sebagian besar masih dipisahkan oleh tanah kosong/hutan.

Untuk itu pembangunan sarana dan prasarana transportasi sangat diperlukan dalam mobilisasi arus barang dan penumpang dari dan ke berbagai

tujuan di Kalimantan Tengah. Hal ini sangat berperan terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing Kalimantan Tengah di pasar regional, nasional maupun internasional. Dengan terbukanya akses-akses ini diharapkan dapat meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa, meningkatkan masuknya investor yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

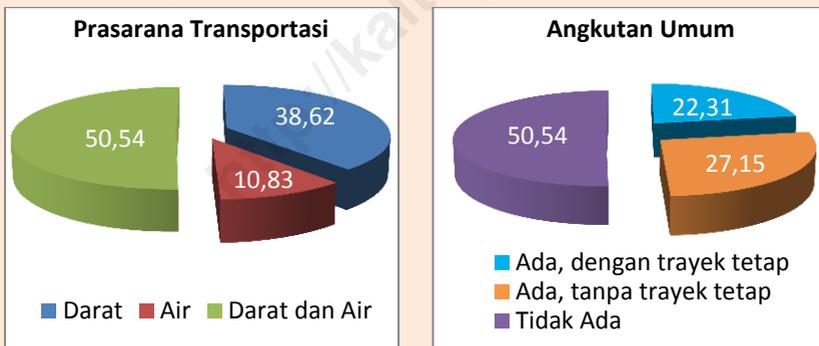
Tabel 8.1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Prasarana Transportasi dan Keberadaan Angkutan Umum, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Prasarana Transportasi			Keberadaan Angkutan Umum		
	Darat	Air	Darat dan Air	Ada, dengan Trayek tetap	Ada, tanpa Trayek tetap	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kotawaringin Barat	76	2	16	18	32	44
Kotawaringin Timur	73	16	96	36	53	96
Kapuas	57	14	162	41	54	138
Barito Selatan	31	22	42	41	13	41
Barito Utara	43	3	57	24	27	52
Sukamara	19	1	12	1	23	8
Lamandau	42	3	38	19	14	50
Seruyan	14	26	60	28	33	39
Katingan	11	48	102	25	66	70
Pulang Pisau	38	6	55	41	30	28
Gunung Mas	56	1	70	10	43	74
Barito Timur	84	1	18	28	8	67
Murung Raya	45	24	55	26	27	71
Palangka Raya	17	3	10	12	3	15
Kalimantan Tengah	606	170	793	350	426	793

Sumber: Podes 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa 606 desa/kelurahan yang lalu lintas dari dan ke desa/kelurahan bisa dilalui lewat darat, 170 desa/kelurahan hanya bisa melalui air dan 793 desa/kelurahan yang bisa melalui darat dan air. Jika dilihat persentasenya seperti pada gambar 8.1 hanya 38,62 persen desa/kelurahan yang lalu lintas dari dan ke desa/kelurahannya melalui darat, 10,83 persen desa/kelurahan hanya bisa melalui air, serta 50,54 persen desa/kelurahan yang bisa melalui darat dan air. Kemudian jika kita lihat dari sarana angkutan umum yang melewati desa/kelurahan, hanya 776 desa/kelurahan (49,46 persen) yang ada angkutan umum yang melewati desa/kelurahan, atau dengan kata lain masih ada 793 desa/kelurahan (50,54 persen) yang akses transportasinya masih terbatas karena tidak ada angkutan umum yang melewati desa/kelurahan.

Gambar 8.1. Persentase Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Keberadaan Angkutan Umum, 2014



Sumber: Podes 2014

Kemudian dari tabel 8.2 terlihat bahwa dari 1.399 desa/kelurahan yang prasarana transportasinya bisa melalui darat hanya 425 desa/kelurahan yang permukaan jalan terluasnya aspal/beton sedangkan yang lainnya jalan diperkeras, tanah atau lainnya, yaitu 397 desa/kelurahan yang permukaan jalan terluasnya jalan diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain), 552

desa/kelurahan yang permukaan jalan terluasnya tanah dan 25 desa/kelurahan yang permukaan jalan terluasnya lainnya (jalan setapak, kayu/papan, dan lain-lain).

Tabel 8.2. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan Terluas, 2014

Kabupaten/Kota	Aspal/ Beton	Diperkeras (Kerikil, Batu, dll)	Tanah	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	30	28	31	3	92
Kotawaringin Timur	35	57	77	-	169
Kapuas	54	78	82	5	219
Barito Selatan	40	16	9	8	73
Barito Utara	43	11	44	2	100
Sukamara	12	9	10	-	31
Lamandau	13	38	29	-	80
Seruyan	13	24	37	-	74
Katingan	21	21	71	-	113
Pulang Pisau	51	15	27	-	93
Gunung Mas	28	29	67	2	126
Barito Timur	50	43	8	1	102
Murung Raya	19	27	50	4	100
Palangka Raya	16	1	10	-	27
Kalimantan Tengah	425	397	552	25	1 399

Sumber: Podes 2014

Seperti terlihat pada tabel 8.3, dari 1.399 desa/kelurahan yang menggunakan prasarana transportasi darat hanya 804 desa/kelurahan yang jalannya dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat atau lebih sepanjang

tahun dan masih ada 158 desa/kelurahan yang jalannya sama sekali tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat atau lebih sepanjang tahun.

Tabel 8.3. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat, 2014

Kabupaten/Kota	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu	Sepanjang Tahun Kecuali Sepanjang Musim Hujan	Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	76	6	8	2	92
Kotawaringin Timur	91	52	6	20	169
Kapuas	92	37	29	61	219
Barito Selatan	40	12	5	16	73
Barito Utara	51	29	6	14	100
Sukamara	28	3	-	-	31
Lamandau	62	15	3	-	80
Seruyan	42	22	6	4	74
Katingan	51	44	13	5	113
Pulang Pisau	58	9	17	9	93
Gunung Mas	61	38	16	11	126
Barito Timur	87	11	4	-	102
Murung Raya	46	31	10	13	100
Palangka Raya	19	5	-	3	27
Kalimantan Tengah	804	314	123	158	1 399

Sumber: Podes 2014

8.2. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi antar individu melalui sistem simbol bersama. Telekomunikasi, berarti proses komunikasi yang dilakukan melalui jarak jauh. Dalam kaitannya dengan komunikasi elektronika, telekomunikasi mengandung pengertian ilmu, teknologi, dan cara-cara atau prosedur pemindahan atau penyebaran informasi berupa: sinyal listrik melalui suatu media transmisi dalam jarak jauh. Informasi yang dapat dipertukarkan banyak variasinya, dan sebagai contoh: data, suara, grafik, sinyal video, dan lain sebagainya. Media transmisi juga banyak jenisnya, dan yang sering dipergunakan di antaranya: kabel koaksial, serat optik, frekuensi radio, infra-merah, dan sebagainya.

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana dan prasarana, yang menjadi kesatuan dari pembangunan nasional, diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Hasil evaluasi Bappenas pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika menunjukkan bahwa ketersediaan total akses telekomunikasi meningkat, namun di sisi lain disparitas infrastruktur masih besar terutama di wilayah perdesaan karena penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di perdesaan baru mulai dapat diimplementasikan pada tahun 2009 melalui program Universal Service Obligation (USO). Hasil evaluasi lainnya menunjukkan bahwa tingkat e-literasi masyarakat masih rendah sehingga pemanfaatan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika lebih banyak bersifat konsumtif. Selain disparitas penyediaan akses dan

rendahnya tingkat e-literasi, permasalahan yang dihadapi adalah 1) sangat terbatasnya infrastruktur masa depan, yaitu pita lebar (broadband) yang saat ini masih didominasi oleh pita lebar nirkabel (wireless broadband) dan jangkauannya baru mencapai sekitar satu persen; 2) belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya terbatas, seperti spektrum frekuensi radio, orbit satelit, penomoran, nama ranah, dan alamat internet protocol (IP); 3) terbatasnya pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam negeri serta pemanfaatan open source; 4) meningkatnya kejahatan berbasis TIK (cyber crime) di dunia perbankan dan penyalahgunaan (abuse dan misuse) TIK yang menimbulkan keresahan di masyarakat seperti penipuan, pencurian identitas, terorisme, dan pornografi.

Saat ini proses telekomunikasi hampir selalu melibatkan pemancaran gelombang elektromagnetik melalui sebuah pesawat pemancar. Hal ini, tentu belum pernah kita jumpai pada masa lampau, di mana pada saatnya, orang berkomunikasi dengan menggunakan sinyal asap, kentongan, atau bendera semafar. Jaman modern seperti sekarang ini, telekomunikasi sudah sangat luas dengan penggunaan berbagai macam piranti untuk membantu proses komunikasi. Contoh yang sudah sangat akrab dengan kita adalah: televisi, radio, telepon.

Di samping itu dapat dijumpai pula penggunaan jaringan yang menghubungkan piranti-piranti komunikasi, seperti: jaringan komputer, jaringan telepon umum, jaringan radio, dan jaringan televisi. Komunikasi dengan komputer lebih banyak pula penggunaannya melalui internet, misalnya: dengan internet, untuk berkirim surat dan pesan-pesan serba cepat. Sistem itu adalah sebagian contoh dari telekomunikasi.

Tabel 8.4. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Komunikasi, 2014

Kabupaten/Kota	Sarana Komunikasi *)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kotawaringin Barat	15	-	1	4	12	17	6	5	10
Kotawaringin Timur	14	-	13	1	5	15	8	16	5
Kapuas	8	-	1	2	1	19	11	7	6
Barito Selatan	3	1	10	2	6	5	6	-	15
Barito Utara	2	-	2	-	1	4	3	3	2
Sukamara	2	-	-	-	2	3	2	2	1
Lamandau	1	1	3	1	2	6	2	3	1
Seruyan	6	-	-	-	3	4	2	-	16
Katingan	3	-	2	-	12	7	4	6	1
Pulang Pisau	2	-	-	-	3	6	5	19	12
Gunung Mas	2	-	-	-	1	3	6	5	10
Barito Timur	4	-	-	-	3	5	2	-	2
Murung Raya	1	-	1	-	2	1	2	3	6
Palangka Raya	9	-	-	1	2	4	3	6	5
Kalimantan Tengah	72	2	33	11	55	99	62	75	92

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Telepon Kabel
 2. Telepon Umum Koin
 3. Telepon Umum Kartu
 4. Wartel/Kiospon/Warpostel
 5. Fasilitas Internet Kantor Kades/Lurah
 6. Warnet
 7. Kantor Pos/Pos Pembantu
 8. Pelayanan Pos Keliling
 9. Jasa Ekspedisi Swasta

Dari tabel 8.4 terlihat bahwa hanya 72 desa/kelurahan yang ada warganya berlangganan telepon kabel. Hal ini mungkin dikarenakan semakin banyaknya warga yang beralih ke telepon seluler, dengan semakin luasnya jangkauan *provider* telepon seluler. Kemudian hanya 2 desa/kelurahan yang masih tersedia telepon koin yang masih aktif/berfungsi dan 33

desa/kelurahan yang masih tersedia telepon umum kartu yang masih aktif/berfungsi serta 11 desa/kelurahan yang masih tersedia wartel/kiospon/warpostel/warparpostel, penggunaan dari ketiga sarana ini juga dirasakan mulai berkurang seiring semakin banyaknya pengguna telepon seluler. Keberadaan sarana internet di desa/kelurahan dapat menunjang dalam memenuhi kebutuhan warga akan informasi dan komunikasi, dimana ada 55 desa/kelurahan yang tersedia fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah dan 99 desa/kelurahan yang telah tersedia warung internet (warnet).

Selain itu sarana komunikasi yang lain yaitu pos juga masih sangat dibutuhkan terutama untuk daerah dengan akses telekomunikasi yang terbatas. Kantor pos/pos pembantu sudah ada di semua kabupaten/kota, walaupun hanya tersebar di 62 desa/kelurahan. Pelayanan pos keliling tersedia di 75 desa/kelurahan, sedangkan jasa ekspedisi swasta tersedia di 92 desa/kelurahan.

Seiring dengan pergeseran sarana komunikasi dari berkabel menjadi nirkabel, pembangunan sarana komunikasi nirkabel juga diupayakan menjangkau hingga daerah pelosok sehingga bisa terjangkau akses komunikasi. Base Transceiver Station (BTS) merupakan alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (transceiver) sinyal komunikasi seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antena sebagai perangkat transceiver. Dari tabel 8.5 terlihat bahwa ada 369 desa/kelurahan yang telah ada BTS dan tersebar di 14 kabupaten/kota, sehingga sinyal telepon seluler juga sudah bisa ditangkap di 1.276 desa/kelurahan, bahkan di Sukamara dan Palangka Raya sudah semua desa terjangkau oleh sinyal telepon seluler.

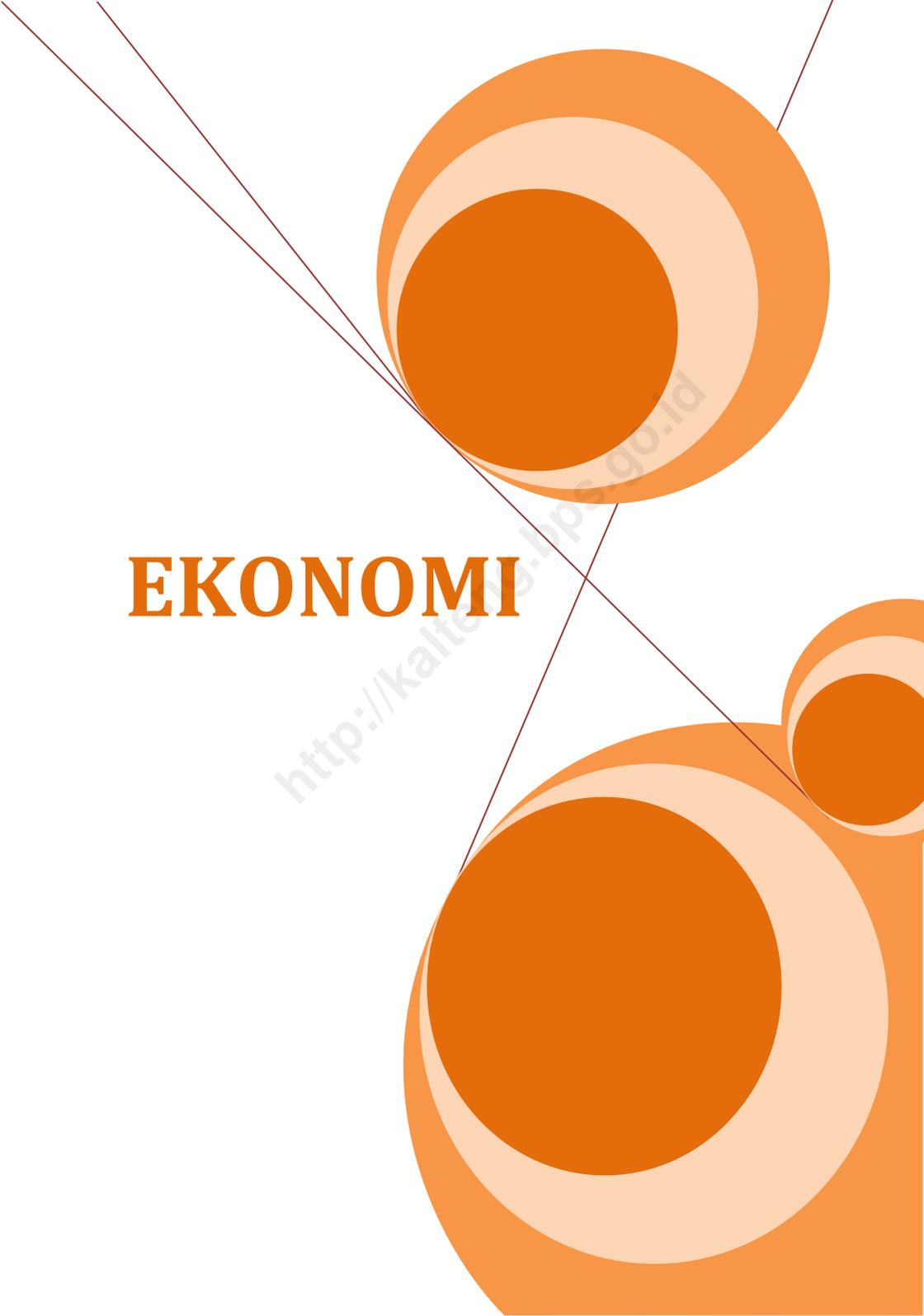
Tabel 8.5. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Menara Telpn Seluler/Base Transceiver Station (BTS) dan Sinyal Telepon Seluler, 2014

Kabupaten/Kota	Menara Telepon Seluler/ Base Transceiver Station (BTS)		Sinyal Telepon Seluler	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	40	54	84	10
Kotawaringin Timur	59	126	166	19
Kapuas	53	180	194	39
Barito Selatan	23	72	94	1
Barito Utara	22	81	86	17
Sukamara	12	20	32	-
Lamandau	13	70	60	23
Seruyan	32	68	75	25
Katingan	17	144	100	61
Pulang Pisau	27	72	95	4
Gunung Mas	19	108	86	41
Barito Timur	20	83	100	3
Murung Raya	15	109	74	50
Palangka Raya	17	13	30	-
Kalimantan Tengah	369	1 200	1 276	293

Sumber: Podes 2014

EKONOMI

<http://kaltelg-lps.go.id>



BAB IX EKONOMI

9.1. Industri Mikro dan Kecil

Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal. Usaha mikro dan kecil umumnya memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya.

Industri kecil adalah industri yang jumlah pekerjanya paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang, termasuk pengusaha. Sedangkan industri mikro adalah industri yang jumlah pekerjanya paling banyak 4 orang, termasuk pengusaha. Industri Mikro dan Kecil dikelompokkan menurut bahan baku utama dengan tenaga kerja kurang dari 20 pekerja, yaitu:

- a) Industri dari Kulit adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kulit. Contoh pembuatan tas, sepatu, sandal, dan sebagainya.
- b) Industri dari Kayu adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kayu dan sejenisnya, misalnya industri pembuatan meubel/furnitur, mainan dari kayu, lantai dari kayu, dsb. Ukiran tidak termasuk barang industri dari kayu karena termasuk barang seni.

- c) Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari logam mulia dan bahan bahan dari logam, misalnya pembuatan anting-anting, gelang, cincin dan pembuatan perhiasan lainnya dari emas atau perak serta bahan bahan dari logam (misal peralatan rumah tangga).
- d) Industri Anyaman adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, misalnya keset kaki, tikar, tas, hiasan dinding, keranjang, topi, kipas, dan sebagainya.
- e) Industri Gerabah/Keramik/Batu adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari gerabah/keramik/porselen/batu dan sejenisnya, misalnya alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar (misal kendi, genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, dsb). Tidak termasuk pembuatan barang seni, misalnya patung, gapura, dll.
- f) Industri dari Kain/Tenun adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kain/benang dan sejenisnya.
- g) Industri Makanan dan Minuman adalah industri yang menghasilkan produk makanan/minuman dan sejenisnya, termasuk pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, penggilingan padi-padian, dll.

Dari tabel 9.1 terlihat banyaknya desa/kelurahan yang ada industri mikro dan kecil menurut kabupaten/kota. Jika kita lihat dari jenisnya, industri mikro dan kecil dari kulit terdapat hanya di 9 desa/kelurahan yang yang tersebar di 6 kabupaten/kota, industri mikro dan kecil dari kayu terdapat di 397 desa/kelurahan, industri mikro dan kecil dari logam mulia atau bahan logam terdapat di 68 desa/kelurahan yang tersebar di 10 kabupaten, industri anyaman mikro dan kecil terdapat di 290 desa/kelurahan, industri mikro dan kecil dari gerabah/keramik/batu terdapat di 175 desa/kelurahan, industri mikro dan kecil dari kain/tenun terdapat di 47 desa/kelurahan yang tersebar di

10 kabupaten/kota, industri makanan dan minuman mikro dan kecil terdapat di 492 desa/kelurahan, dan industri mikro dan kecil lainnya terdapat di 151 desa/kelurahan.

Tabel 9.1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Industri Mikro dan Kecil, 2014

Kabupaten/Kota	Industri Mikro dan Kecil *)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kotawaringin Barat	2	54	6	22	28	2	48	8
Kotawaringin Timur	-	36	-	16	18	6	38	15
Kapuas	-	38	6	78	12	4	89	44
Barito Selatan	-	27	1	18	6	12	32	2
Barito Utara	-	8	-	9	2	-	13	1
Sukamara	1	15	4	13	6	-	15	2
Lamandau	2	20	3	5	11	3	13	14
Seruyan	-	18	-	6	14	-	28	-
Katingan	2	42	2	16	13	-	40	50
Pulang Pisau	-	24	10	44	28	1	52	-
Gunung Mas	-	37	7	23	13	3	71	2
Barito Timur	-	22	26	15	14	6	28	8
Murung Raya	1	42	3	13	1	1	8	-
Palangka Raya	1	14	-	12	9	9	17	5
Kalimantan Tengah	9	397	68	290	175	47	492	151

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Kulit

2. Kayu

3. Logam Mulia atau Bahan Logam

4. Anyaman

5. Gerabah/Keramik/Batu

6. Kain/Tenun

7. Makanan dan Minuman

8. Lainnya

9.2. Sarana Perdagangan

Perdagangan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, utamanya dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Perdagangan dan investasi merupakan dua faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Percepatan pembangunan sektor perdagangan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran. Peningkatan kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam pembentukan PDRB menunjukkan bahwa peran perdagangan semakin penting dalam pertumbuhan ekonomi baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan tersebut didukung oleh oleh sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan. Sektor UMKM sebagai pelaku industri kreatif merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekspor maupun pasar domestik dengan didukung penataan sistem distribusi yang menjamin kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha dan daya saing produk domestik.

Sarana perdagangan yang dicakup dalam Podes 2014 yaitu kelompok pertokoan, pangkalan/agen minyak tanah, pangkalan/agen/penjual LPG, pasar, minimarket, toko/warung kelontong, warung/kedai makanan minuman, dan restoran/rumah makan.

- a) Kelompok pertokoan merupakan sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi.
- b) Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar bisa menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan. Barang yang diperjualbelikan di dalam pasar bisa terdiri dari banyak komoditas (campuran) ataupun secara khusus suatu komoditas tertentu.
- c) Minimarket merupakan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran, dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400m².
- d) Toko/warung kelontong merupakan bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri dikelola oleh satu penjual.
- e) Warung/kedai makanan minuman merupakan usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat izin usaha.
- f) Restoran merupakan suatu jenis usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahan dan penyajiannya secara langsung di tempat sesuai dengan keinginan para pengguna jasa yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.
- g) Rumah makan merupakan jenis usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya bisa dilakukan diluar rumah makan, yang mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak.

Tabel 9.2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Perdagangan, 2014

Kabupaten/Kota	Sarana Perdagangan *)									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kotawaringin Barat	22	42	26	13	4	5	12	93	71	12
Kotawaringin Timur	23	48	29	18	48	61	7	155	85	7
Kapuas	18	30	71	12	35	95	3	210	170	5
Barito Selatan	7	7	20	2	42	42	2	91	48	4
Barito Utara	2	5	30	3	34	26	3	94	55	5
Sukamara	8	18	18	4	1	2	3	30	25	3
Lamandau	11	5	13	5	1	2	2	81	37	1
Seruyan	10	18	29	5	19	18	5	88	38	-
Katingan	6	22	25	17	20	25	4	140	49	9
Pulang Pisau	1	44	25	3	25	30	2	95	71	6
Gunung Mas	5	21	11	4	17	21	2	120	35	2
Barito Timur	2	4	36	2	50	24	3	102	66	1
Murung Raya	8	21	17	3	6	5	2	108	35	1
Palangka Raya	9	18	10	6	6	15	9	29	20	9
Kalimantan Tengah	132	303	360	97	308	371	59	1 436	805	65

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) :

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. Kelompok Pertokoan | 6. Pasar Tanpa Bangunan |
| 2. Pangkalan/Agen Minyak Tanah | 7. Minimarket |
| 3. Pangkalan/Agen/Penjual LPG | 8. Toko/Warung Kelontong |
| 4. Pasar Bangunan Permanen | 9. Warung/Kedai Makanan Minuman |
| 5. Pasar Bangunan Semi Permanen | 10. Restoran/Rumah Makan |

Dari tabel di atas terlihat bahwa sarana perdagangan terbanyak yang terdapat di desa/kelurahan adalah toko/warung kelontong, sedangkan yang paling sedikit adalah minimarket. Secara rinci, kelompok pertokoan terdapat di 132 desa/kelurahan, pangkalan/agen minyak tanah terdapat di 303 desa/

kelurahan, pangkalan/agen/penjual LPG terdapat di 360 desa/kelurahan, pasar dengan bangunan permanen terdapat di 97 desa/kelurahan, pasar dengan bangunan semi permanen terdapat di 308 desa/kelurahan, pasar tanpa bangunan terdapat di 371 desa/kelurahan, minimarket terdapat di 59 desa/kelurahan, toko/warung kelontong terdapat di 1.436 desa/kelurahan, warung/kedai makanan minuman terdapat di 805 desa/kelurahan, dan restoran/rumah makan terdapat di 65 desa/kelurahan.

9.3. Sarana Akomodasi

Fungsi utama hotel sebagai sarana akomodasi tempat menginap sementara bagi para tamu yang datang dari berbagai tempat. Namun seiring perkembangan zaman fungsi hotel tidak hanya sebagai tempat menginap saja, akan tetapi sekarang ini fungsi hotel juga sebagai tempat melakukan pertemuan bisnis, seminar, tempat berlangsungnya pesta pernikahan (resepsi), lokakarya, musyawarah nasional dan kegiatan lainnya. Hotel dijadikan sebagai tempat melakukan berbagai kegiatan karena memang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh para tamu. Peranan hotel dalam industri pariwisata memang sangat penting. Betapa tidak, hotel sebagai sarana akomodasi umum sangat membantu para wisatawan yang sedang berkunjung untuk berwisata dengan jasa penginapan yang disediakan oleh hotel. Hubungan industri perhotelan dan kepariwisataan memiliki kaitan yang erat. Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan (*main tourism superstructures*) yang berarti hidup dan kehidupannya banyak tergantung pada jumlah wisatawan yang datang. Bila kita umpamakan industri pariwisata itu sebagai suatu bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya.

Sebagai industri perdagangan yang bergerak di bidang jasa, pariwisata memiliki mekanisme pengaturan yang kompleks karena mencakup

pengaturan pergerakan wisatawan dari negara asalnya, di daerah tujuan wisata hingga kembali ke negara asalnya dengan melibatkan banyak hal antara lain: transportasi, penginapan, restoran, pemandu wisata, dan lain-lain. Oleh karena itu, industri pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata.

Industri pariwisata telah diakui sebagai yang paling penting, dan menguntungkan, terutama ditinjau dari sudut perekonomian yang banyak menghasilkan devisa bagi negara. Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Pariwisata mampu menunjang pembangunan negara karena:

- a) membantu menciptakan sekaligus menambah lapangan kerja, termasuk jasa hotel, angkutan, industri sandang pangan, pertanian, hiburan, cendramata, dan lain-lain;
- b) membantu perkembangan industri-industri kecil seperti objek wisata, restoran, tempat hiburan, dan objek-objek lainnya;
- c) pariwisata memungkinkan terjaganya kelestarian alam serta kebudayaan;
- d) menimbulkan rasa saling mengenal serta menghargai antar bangsa, sehingga dapat mempererat hubungan antar manusia yang cinta damai.

Dalam industri pariwisata, hotel bukan satu-satunya bentuk akomodasi bagi wisatawan. Akan tetapi masih banyak jenis akomodasi lain yang dikenal dengan sebutan akomodasi tambahan (*supplementary accomodation*) seperti biro perjalanan wisata, *operator adventure tour*, operator pariwisata dan lain-lain. Selain dalam industri pariwisata, hotel juga memiliki peranan penting dalam pembangunan negara yakni meningkatkan industri rakyat, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, membantu usaha pendidikan dan latihan, meningkatkan devisa negara, meningkatkan pendapatan daerah dan negara serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Jika kita lihat dari tabel 9.3, hotel hanya terdapat di 41 desa/kelurahan,

bahkan di Pulang Pisau sama sekali tidak ada. Sedangkan penginapan (hotel/motel/losmen/wisma) terdapat di 100 desa/kelurahan.

Tabel 9.3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Sarana Akomodasi, 2014

Kabupaten/Kota	Hotel		Penginapan	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	9	85	10	84
Kotawaringin Timur	5	180	11	174
Kapuas	4	229	11	222
Barito Selatan	3	92	4	91
Barito Utara	2	101	8	95
Sukamara	1	31	4	28
Lamandau	1	82	3	80
Seruyan	2	98	7	93
Katingan	2	159	14	147
Pulang Pisau	-	99	6	93
Gunung Mas	2	125	5	122
Barito Timur	2	101	2	101
Murung Raya	1	123	8	116
Palangka Raya	7	23	7	23
Kalimantan Tengah	41	1 528	100	1 469

Sumber: Podes 2014

9.4. Koperasi

Koperasi menurut UU No. 25/1992 tentang perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip:

- 1) Keanggotaannya sukarela dan terbuka,

- 2) Pengelolaannya dilakukan secara demokratis,
- 3) Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota,
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal,
- 5) Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Peranan koperasi dalam pembangunan nasional sangat dibutuhkan untuk mendukung dan menunjang segala sektor bentuk kegiatan usaha yang mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya.

Koperasi yang dicakup dalam Podes 2014 yaitu Koperasi unit Desa (KUD), Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra), dan Koperasi Simpan Pinjam (Kospin). KUD merupakan suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri. Kopinkra merupakan koperasi yang beranggotakan industri-industri kecil dan kerajinan rakyat yang ada di wilayah desa/kelurahan. Sedangkan Kospin merupakan koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman. Dari tabel 9.4 terlihat bahwa KUD terdapat di 311 desa/kelurahan, Kopinkra hanya terdapat di 13 desa/kelurahan yang tersebar

di 6 kabupaten, Kospin hanya terdapat di 197 desa/kelurahan, dan koperasi lainnya terdapat di 147 desa/kelurahan.

Tabel 9.4. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Koperasi, 2014

Kabupaten/Kota	Koperasi Unit Desa (KUD)	Koperasi		
		Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)	Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	Koperasi Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kotawaringin Barat	29	3	20	22
Kotawaringin Timur	57	2	15	16
Kapuas	26	1	29	28
Barito Selatan	20	1	13	10
Barito Utara	30	-	10	10
Sukamara	17	-	4	9
Lamandau	42	-	13	14
Seruyan	28	-	15	5
Katingan	18	5	11	13
Pulang Pisau	10	-	5	4
Gunung Mas	9	-	16	2
Barito Timur	10	-	19	9
Murung Raya	10	1	11	3
Palangka Raya	5	-	16	2
Kalimantan Tengah	311	13	197	147

Sumber: Podes 2014

9.5. Fasilitas Perkreditan dan Perbankan

Fasilitas perkreditan merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Fasilitas perkreditan yang dicakup dalam Podes 2014 yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), dan Kredit Usaha Kecil (KUK).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap risiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah Mandiri (BSM), (Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat).

Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang merupakan salah satu program Kementerian Pertanian berupa kredit investasi dan/atau modal kerja yang diberikan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pengembangan tanaman baku dan bahan bakar nabati (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2010). Dalam pelaksanaannya, ditunjuk 22 bank umum untuk menyediakan, menyalurkan, dan menatausahakan KKP-E. Sedangkan Kredit Usaha Kecil (KUK) adalah kredit investasi atau modal kerja

yang diberikan kepada usaha kecil untuk membiayai usaha yang produktif. Dari tabel 9.5 terlihat bahwa KUR telah terdapat di 453 desa/kelurahan, KUK terdapat di 190 desa/kelurahan, sedangkan KKP-E hanya terdapat di 49 desa/kelurahan yang tersebar di 8 kabupaten.

Tabel 9.5. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Fasilitas Perkreditan, 2014

Kabupaten/Kota	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)	Kredit Usaha Kecil (KUK)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	58	3	35
Kotawaringin Timur	52	-	24
Kapuas	99	10	19
Barito Selatan	13	-	10
Barito Utara	21	-	3
Sukamara	16	-	7
Lamandau	11	16	3
Seruyan	24	1	8
Katingan	36	2	20
Pulang Pisau	41	15	17
Gunung Mas	19	1	16
Barito Timur	33	1	10
Murung Raya	10	-	7
Palangka Raya	20	-	11
Kalimantan Tengah	453	49	190

Sumber: Podes 2014

Seperti kita ketahui bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup

rakyat banyak. Dalam fungsinya bank yaitu sebagai penghimpun, penyalur dan pelayan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Peranan bank sebagai lembaga keuangan yaitu sebagai lembaga yang memberi kemudahan pada masyarakat dalam hal penghimpun investasi dan sebagai alat transaksi bagi masyarakat.

Dalam kegiatannya, bank dituntut untuk menjalankan fungsi dan peranannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana dalam menjalankan kegiatan bank harus memenuhi syarat kesehatan bank guna menjaga kepercayaan atas nasabah yang merupakan objek terpenting dalam bank. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua bank dapat memenuhi syarat kesehatan, ada bank yang mempunyai masalah dengan kesehatan bank, namun dalam hal ini perlu campur tangan pemerintah melalui Bank Indonesia guna meningkatkan kualitas bank dan meningkatkan perekonomian rakyat melalui penyaluran dana dari bank.

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum pemerintah maupun swasta. Yang termasuk bank umum pemerintah meliputi Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Sedangkan yang termasuk bank umum swasta, meliputi Bank Danamon, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, dan sebagainya.

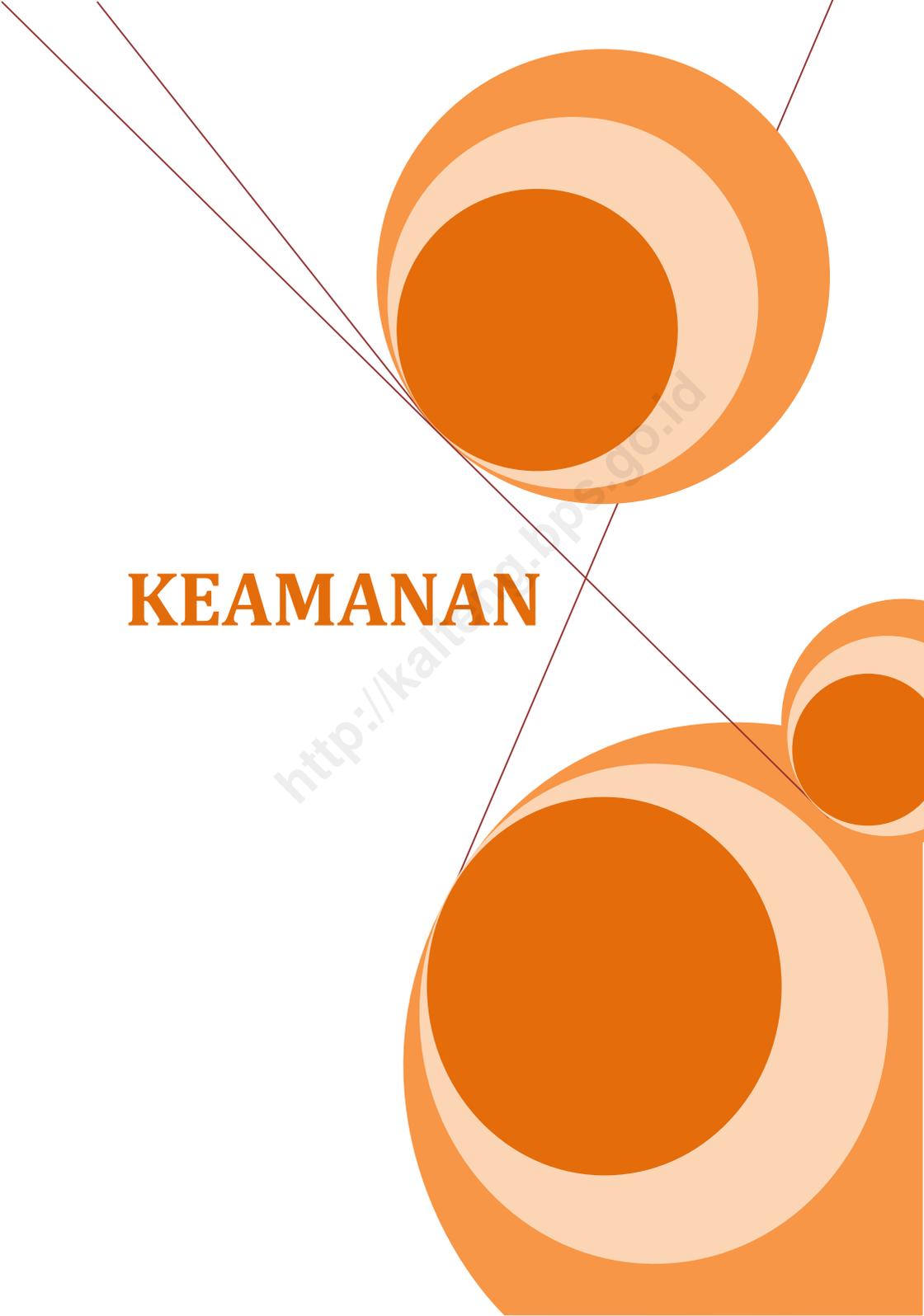
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada bank lain.

Dari tabel 9.6 terlihat bahwa Bank Umum Pemerintah terdapat di 70 desa/kelurahan, Bank Umum Swasta terdapat di 18 desa/kelurahan yang tersebar di 8 kabupaten/kota, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat terdapat di 10 desa/kelurahan yang tersebar di 7 kabupaten/kota.

Tabel 9.6. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Fasilitas Perbankan, 2014

Kabupaten/Kota	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kotawaringin Barat	12	3	2
Kotawaringin Timur	11	4	2
Kapuas	9	2	2
Barito Selatan	3	2	-
Barito Utara	4	2	1
Sukamara	2	-	1
Lamandau	2	-	1
Seruyan	2	-	-
Katingan	6	-	-
Pulang Pisau	3	-	-
Gunung Mas	5	-	-
Barito Timur	2	1	-
Murung Raya	1	1	-
Palangka Raya	8	3	1
Kalimantan Tengah	70	18	10

Sumber: Podes 2014

The image features a minimalist design with several overlapping circles in various shades of orange. A large circle is positioned in the upper right, and another large one is in the lower right. A smaller circle is partially visible on the right edge. Thin, dark orange lines intersect to form a triangular shape that frames the central text. The background is white.

KEAMANAN

<http://kaltim.lps.go.id>

BAB X

KEAMANAN

Dalam liputan beberapa media massa lokal maupun nasional, kita semua dikejutkan dengan gambaran faktual terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia yang semakin memprihatinkan, tidak saja dikarenakan adanya peningkatan angka kejahatan tetapi juga munculnya jenis-jenis kejahatan baru yang tidak pernah terprediksi sebelumnya. Beragam kondisi instabilitas sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, khususnya yang bermukim di wilayah perkotaan, tentunya akan berdampak pada meningkatnya rasa kekhawatiran masyarakat dalam beraktivitas yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya produktivitas masyarakat itu sendiri guna meningkatkan kualitas hidupnya.

Kebutuhan akan pentingnya terwujud stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif tentunya tidak hanya menjadi keinginan dari aparat penegak hukum, tetapi juga bagi masyarakat itu sendiri. Apabila diperhatikan lebih mendalam, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, di antaranya:

- a) Kondisi perekonomian yang belum stabil, baik makro maupun mikro.
Secara makro, dengan perekonomian negara yang tidak kunjung membaik menyebabkan lapangan kerja semakin sempit karena aktivitas perekonomian lambat bergerak. Akibatnya, angka pengangguran semakin tinggi. Secara mikro, banyaknya anggota masyarakat yang menganggur berpotensi meningkatnya angka kriminalitas, sementara biaya pemenuhan keperluan dan kebutuhan ekonomi sehari-hari semakin tinggi.
- b) Tidak maksimalnya perangkat institusi dan hukum untuk menjaga dan mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketidakmaksimalan

perangkat institusi dan hukum seringkali menjadi faktor sulitnya menjaga dan mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi jika antara aparat penegak hukum dengan masyarakat yang melanggar terjadi kolusi sehingga menyebabkan masyarakat semakin antipati terhadap aparat penegak hukum.

- c) Ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi sosial di lingkungannya turut mendorong terjadinya instabilitas sosial. Masyarakat yang seharusnya melaporkan beragam masalah sosial yang terjadi di lingkungannya kepada aparat berwajib namun justru bersikap diam akan menyebabkan kondisi instabilitas tetap tumbuh dan berkembang tanpa bisa diatasi. Ironisnya, banyak anggota masyarakat yang justru terlibat dalam aktivitas menyimpang tersebut.
- d) Hilangnya sikap keteladanan yang seharusnya diberikan oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan (dalam arti luas). Contoh, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, tokoh masyarakat turut serta dalam aktivitas kriminal, tokoh agama yang melindungi para pelaku kriminal karena pelaku kriminal secara periodik telah membantu aktivitas keagamaan, dan sebagainya.

Demikian kompleksnya permasalahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mendorong perlunya peran serta aktif dari segenap anggota masyarakat dalam mendukung terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Hal ini dapat terjadi karena masyarakatlah sebenarnya yang lebih memahami dan mengerti tata cara menciptakan suasana aman dan tertib di lingkungannya masing-masing.

Tabel 10.1. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan Setahun Terakhir, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Kejahatan *)										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Kotawaringin Barat	35	2	11	6	2	2	8	21	4	1	50
Kotawaringin Timur	56	4	15	15	4	6	19	16	6	-	121
Kapuas	60	4	5	9	1	4	12	26	7	-	154
Barito Selatan	17	1	4	1	2	-	1	8	2	-	73
Barito Utara	28	1	3	2	1	3	4	20	-	-	63
Sukamara	11	1	2	2	3	2	-	7	-	1	18
Lamandau	24	-	7	9	3	4	7	18	3	-	50
Seruyan	32	2	4	4	11	1	8	12	5	-	57
Katingan	27	2	11	5	-	1	4	22	3	-	119
Pulang Pisau	17	1	5	-	-	1	1	10	4	-	72
Gunung Mas	29	2	11	4	4	2	8	27	8	-	69
Barito Timur	41	4	7	4	-	4	3	44	2	-	35
Murung Raya	21	-	4	2	1	-	1	12	4	-	92
Palangka Raya	11	3	6	5	2	2	5	7	3	1	18
Kalimantan Tengah	409	27	95	68	34	32	81	250	51	3	991

Sumber: Podes 2014

Keterangan *) : 1. Pencurian
 2. Pencurian dengan kekerasan
 3. Penipuan/penggelapan
 4. Penganiayaan
 5. Pembakaran
 6. Perkosaan/asusila
 7. Penyalahgunaan narkoba
 8. Perjudian
 9. Pembunuhan
 10. Perdagangan orang
 11. Tidak ada tindak kejahatan

Dari tabel di atas terlihat bahwa tindak kejahatan terjadi di 578 desa/kelurahan, dimana pencurian merupakan tindak kejahatan yang paling banyak terjadi yaitu di 409 desa/kelurahan, disusul kemudian tindak kejahatan perjudian yang terjadi di 250 desa/kelurahan, tindak kejahatan

penipuan/penggelapan terjadi di 95 desa/kelurahan, tindak kejahatan penyalahgunaan/peredaran narkoba terjadi di 81 desa/kelurahan, tindak kejahatan penganiayaan terjadi di 68 desa/kelurahan, tindak kejahatan pembunuhan terjadi di 51 desa/kelurahan, tindak kejahatan pembakaran terjadi di 34 desa/kelurahan, tindak kejahatan perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan terjadi di 32 desa/kelurahan, tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan terjadi di 27 desa/ kelurahan, tindak kejahatan perdagangan orang (*trafficking*) hanya terjadi di 3 desa/kelurahan di Kotawaringin Barat, Sukamara dan Palangka Raya. Sedangkan 991 desa/kelurahan tidak pernah ada tindak kejahatan selama setahun terakhir.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, di antaranya:

- a) Tokoh agama dan tokoh masyarakat secara aktif memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjadi di wilayahnya.
- b) Mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling) guna mencegah kemungkinan terjadinya aksi-aksi kriminal.
- c) Mengaktifkan kembali gerakan Sadar Hukum (Sadarkum) pada semua tingkat kehidupan masyarakat.
- d) Komponen masyarakat secara rutin menjalin kerja sama dan komunikasi dengan aparat kepolisian guna menginventarisir berbagai potensi gangguan yang dapat muncul sekaligus mencari solusinya.
- e) Apabila muncul ketidaksepahaman terhadap suatu kebijakan disalurkan melalui sarana yang tepat, tidak dilakukan secara anarkis yang justru akan memunculkan permasalahan sosial yang baru.

- f) Tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tetapi berupaya meredam agar isu tersebut tidak meluas.

Tabel 10.2. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan, 2014

Kabupaten/Kota	Pembangunan/ Pemeliharaan Keamanan Lingkungan	Pembentukan/ Pengaturan Keamanan	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/ Linmas	Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan Berasal dari Inisiatif Warga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kotawaringin Barat	80	78	63	75	70
Kotawaringin Timur	112	94	68	121	89
Kapuas	119	72	27	145	102
Barito Selatan	80	68	26	78	66
Barito Utara	74	50	38	63	61
Sukamara	27	23	9	22	18
Lamandau	70	49	47	57	57
Seruyan	58	38	28	46	57
Katingan	44	50	35	85	31
Pulang Pisau	69	41	34	74	46
Gunung Mas	52	33	23	87	55
Barito Timur	89	68	19	82	70
Murung Raya	93	44	27	77	54
Palangka Raya	24	26	23	23	22
Kalimantan Tengah	991	734	467	1 035	798

Sumber: Podes 2014

Seperti terlihat pada tabel 10.2, ada beberapa kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungannya, pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan dilakukan di 991 desa/kelurahan, pembentukan/pengaturan regu keamanan dilakukan di 734 desa/kelurahan, penambahan jumlah anggota hansip dilakukan di 467 desa/kelurahan, pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan dilakukan di 1.035 desa/kelurahan, dan pengaktifan sistem keamanan lingkungan yang berasal dari inisiatif warga dilakukan di 798 desa/kelurahan.

Tabel 10.3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Keberadaan Pos Polisi dan Anggota Linmas/Hansip, 2014

Kabupaten/Kota	Pos Polisi (Termasuk Polsek, Polres, dan Polda)	Anggota Linmas/Hansip
(1)	(2)	(3)
Kotawaringin Barat	19	94
Kotawaringin Timur	20	163
Kapuas	28	156
Barito Selatan	14	95
Barito Utara	11	94
Sukamara	5	32
Lamandau	9	82
Seruyan	13	97
Katingan	17	144
Pulang Pisau	15	99
Gunung Mas	7	115
Barito Timur	10	93
Murung Raya	12	124
Palangka Raya	7	30
Kalimantan Tengah	187	1 418

Sumber: Podes 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa pos polisi (termasuk Polsek, Polres, dan Polda) terdapat di 187 desa/kelurahan, sehingga dengan adanya pos polisi ini akses masyarakat dalam menghubungi polisi jika terjadi suatu tindak kejahatan bisa dengan mudah dilakukan. Selain itu anggota linmas/hansip sebagai penjaga keamanan lingkungan juga diperlukan, dimana untuk saat ini sudah ada di 1.418 desa/kelurahan.

<http://kalteng.bps.go.id>

